

SKRIPSI
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK
JALANAN DI KOTA PAREPARE



OLEH
AHMAD GHASI SAHARUDDIN
NIM: 2020203870231008

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK
JALANAN DI KOTA PAREPARE**



OLEH

AHMAD GHASI SAHARUDDIN

NIM : 2020203870231008

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab
Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak
Jalanan di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ahmad Ghasi Saharuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203870231008

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah
B-3117/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Mahyuddin, S.Sos., M.A. (.....)

NIP : 199110312019031003

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dekan,



Dawlat Burkidam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak
Jalanan di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ahmad Ghasi Saharuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203870231008

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah
B-3117/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2024

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Mahyuddin, S.Sos., M.A.	(Ketua)	(.....)
Andi Nurul Mutmainnah, M.Si.	(Sekretaris)	(.....)
Selvy Anggriani Syarif, M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dr. A. Mukkadam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi Besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, Ayahanda Saharuddin Samad, S.Pd.I. dan ibunda Hasnawati yang telah membesarkan dan membimbing kami dengan ikhlas serta merawat penulis dengan sepenuh hati.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahyuddin, S.Sos., M.A. selaku pembimbing saya, yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus sebesar-besarnya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. Dekan, Bapak Dr. Iskandar, M.Sos.I. dan Ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. Wakil Dekan I dan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.


4. Ibu Andi Nurul Mutmainnah, M.Si., selaku penguji utama dan Ibu Selvi anggreani Syarif, M.Si., selaku penguji kedua.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Hj. Nurmi, M.A. Kabag TU beserta seluruh staf Fuad yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini serta para staf Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
8. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare beserta jajarannya dan seluruh pihak dan staf Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Warga yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
9. Kepada rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya angkatan 2020 serta teman-teman dan kakak-kakak yang telah memberikan alur pemikirannya masing-masing dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Senior-senior saya dan kakak tingkat saya baik organisasi internal maupun eksternal (Porma dan Sc-Mipa) yang senantiasa memberikan masukan dan saran yang baik bagi penulis.
11. Kepada saudara Muhammad Aidil Ramadhan dan teman-teman saya dari tokyo manji, dan pendamping hidup saya Nurmila, teman kampus dan teman KKN Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang telah membantu, memberikan semangat dan kesan terbaik bagi penulis.
12. Dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah swt membalas kebaikan semua pihak dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

13. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai seala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca dapat memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Juni 2025

Penulis,


Ahmad Ghasi Saharuddin
NIM. 2020203870231008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 17 Oktober 2002
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Juli 2025
Penyusun,


Ahmad Ghasi Saharuddin
NIM. 2020203870231008

ABSTRAK

Ahmad Ghasi Saharuddin. *Peran Dinas Sosial dalam penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare* (dibimbing oleh Mahyuddin).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare, yang menyajikan dua substansi permasalahan yaitu (1) Bagaimana permasalahan sosial anak jalanan di Kota Parepare? (2) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam penanganan anak jalanan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Anak-anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya perhatian pendidikan, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya fasilitas penunjang seperti rumah singgah, serta lemahnya sistem pendataan dan pendampingan yang berkelanjutan. (2) Peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam menangani anak jalanan mencakup beberapa aspek penting, yaitu penjangkauan, pendataan, pemberian bantuan sosial, mediasi dengan keluarga, hingga rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Penanganan, Anak Jalanan, Dinas Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori ACTORS.....	11
2. Teori pemberdayaan	13
3. Teori Struktural-Fungsional	20
C. Kerangka Konseptual	24
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2. Masalah Anak Jalanan.....	26
3. Fungsi dan Peran Dinas Sosial	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
1. Lokasi Penelitian	31
2. Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi.....	33
4. Triangulasi.....	34
F. Uji Keabsahana Data.....	34
1. <i>Credibility</i>	34
2. <i>Transferability</i>	34
3. <i>Dependability</i>	34
4. <i>Confirmability</i>	35
G. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data.....	35
3. Verifikasi Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. HASIL PENELITIAN.....	37
1. Permasalahan Sosial Anak Jalanan Di Kota Parepare.....	37
2. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Kota Parepare	48
B. PEMBAHASAN	58
1. Permasalahan Sosial Anak Jalanan di Kota Parepare.....	58
2. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V

DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL TABEL	HALAMAN
3.1	Jumlah Informan dan Keterangan Wawancara	33
4.1	Data Anak Jalanan	51



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Hasil Turnitin	VI
2	Surat Ketetapan Pembimbing	VII
3	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VIII
4	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
5	Instrumen Penelitian	X
6	Data Anak Jalanan	XII
7	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
8	Surat Keterangan Wawancara	XV
9	Dokumentasi	XXVI
10	Biografi Penulis	XXXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـِيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُـِيْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
----------	------------------

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-*

Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan:

Zaid, *Naşr Hamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة
 دم = بدون مكان
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة

دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها/إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak jalanan merupakan salah satu isu sosial yang signifikan di Indonesia, anak-anak tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan meliputi mengamen, menjual koran, menjajakan makanan dan minuman, membersihkan kaca mobil, mengemis, serta mengumpulkan sumbangan. Umumnya, anak-anak yang bekerja di jalanan melakukannya karena diajak teman, keinginan untuk mandiri, membantu orang tua, atau atas perintah orang tua mereka.¹

Siklus masa anak-anak merupakan fase tumbuh kembang anak dalam menentukan masa depannya. Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliraran di jalanan atau di tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Dengan demikian, anak yang di bawah umur termasuk dalam tanggung jawab negara. Oleh karena itu dinas sosial memiliki peran untuk menjalankan wewenanganya dalam memberikan hak layak hidup.²

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan seperti goyahnya kehidupan kelompok sosial atau masyarakat.³

Anak jalanan muncul karena ketimpangan sosial, anak jalanan tersebut turun ke jalan hanya untuk mencari nafkah dan kehadiran anak jalanan tersebut tidak lepas dari pengaruh sosial, budaya, pendidikan dan psikologis. Anak jalanan sering kali kita lihat di jalan atau bahkan di lampu merah dimana anak jalanan tersebut menghabiskan waktu nya hanya dengan mencari nafkah. Salah satu sebab anak

¹ A Jurana Anggriana, "Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Belajar Cinta Damai Di Kecamatan Ujung Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2023).

² Dian Tannia Rachman, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya," in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 2, 2023, 662–72.

³ Irwanti Said, "Analisis Problem Sosial Makassar" (Alauddin University Press, 2012).

jalan turun ke jalan karena masalah ekonomi dan juga mereka turun ke jalan hanya untuk mencari uang karena anak jalan tersebut merasa nyaman mencari uang di jalan maka dari itulah mereka turun ke jalan.

Anak jalan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapatkan pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalan bahwa anak jalan bagaimana kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan Negara.

Fenomena anak jalan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan, kondisi anak jalan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya dipeoleh anak. Anak jalan justru harus berada di jalan ketika seharusnya bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhan sebagai manusia. Faktor yang mempengaruhi anak jalan biasanya terbentuk dari keadaan mereka sendiri, terutama keadaan finansial anak tersebut dan keluarganya dan anak jalan biasanya berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, kurangnya mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal, dan lainnya.⁴

Anak jalan atau biasa disingkat anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya sudah akrab di jalan. Dan mungkin kita sudah tidak asing tentang sosok ini, karena disetiap penjuru kota, kita dapat dengan mudah menemukan mereka. Mereka yang tergolong kecil dan masih dalam tanggung jawab orang tuanya harus berjuang meneruskan hidup sebagai anak jalan dan terkadang mereka menjadi sasaran tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada juga sebagian orang tua yang dengan alasan untuk membantu

⁴ M Ramadhani and Sarbaini Harpani Matnuh, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalan Di Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).

ekonomi keluarga, menganjurkan agar anak-anaknya untuk menghabiskan masa kecilnya sebagai anak jalanan. Banyak faktor mengapa mereka menjadi anak jalanan, disamping masalah ekonomi keluarga salah satunya adalah kurangnya pendidikan. Usia mereka yang relatif masih kecil dan muda seharusnya masih dalam tahap belajar dan merasakan sebuah pendidikan, tetapi mungkin karena dengan alasan tertentu, mereka malah asyik menikmati hidup sebagai anak jalanan dan tidak mementingkan sebuah pendidikan.⁵

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut. Menurut Dinas Sosial Kota Parepare pada Surat Ketetapan tentang Pelayanan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, termasuk masalah anak jalanan yang bekerja dibawah umur 6-18 Tahun. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara individu melainkan bantuan orang lain. Maka dari itulah sebagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare.

Dinas Sosial Kota Parepare memiliki peran krusial dalam penanganan anak jalanan dengan fokus pada aspek sosial dan kesejahteraan. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, mengalami disfungsi keluarga, atau menjadi korban pengabaian. Dinas Sosial bertanggung jawab atas penertiban dan rehabilitasi anak jalanan melalui mekanisme pelayanan publik yang terstruktur. Proses ini melibatkan penerimaan aduan dari masyarakat mengenai aktivitas anak jalanan, di mana peran Dinas Sosial melakukan pendataan dan asesmen terhadap

⁵ Nurhadi Shadiqin, "Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Jalan Sultan Alauddin Makassar" (Skripsi, 2018).

anak-anak tersebut. Setelah itu, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban yang diperlukan.⁶

Dinas Sosial harus memberikan penanganan kepada anak jalanan agar mereka tidak terlantar di jalanan atau berada di persimpangan lampu merah. Diperlukan perhatian serius untuk membantu anak-anak jalanan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, termasuk isu pendidikan dan ekonomi.

Masalah anak jalanan hingga saat ini belum teratasi karena belum ada solusi yang efektif untuk memastikan kesejahteraan mereka. Anak-anak jalanan perlu mendapatkan bimbingan dan arahan agar dapat menjalani kehidupan yang layak serta mengejar masa depan sesuai dengan impian mereka. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Pemerintah sebagai pemimpin juga bertanggung jawab menjamin kehidupan anak karena wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah).⁷ Aktivitas di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, angka kemiskinan di kota tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang tergolong miskin tercatat sebanyak 7.960 jiwa,

⁶ siti Chelsea Angreiny, "Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2022).

⁷ Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019).

kemudian sedikit menurun menjadi 7.930 jiwa pada tahun 2021, namun kembali naik menjadi 8.010 jiwa pada tahun 2022. Wahidin Syanur, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, mengungkapkan bahwa penyebab umum kemiskinan di Parepare meliputi rendahnya tingkat pendidikan, masalah kesehatan, dan kurangnya motivasi untuk bekerja. Permasalahan anak jalanan di Kota Parepare dapat dilihat dari persentase angka kemiskinan yang memaksa anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan.⁸ Data menunjukkan bahwa banyak anak jalanan di Parepare terlibat dalam aktivitas seperti mengamen dan meminta-minta, yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga menempatkan mereka dalam risiko eksploitasi dan kekerasan. Asumsi Dinas Sosial kurang dalam melakukan penertiban dan pembinaan karena adanya aturan bahwa Dinas Sosial akan melakukan penertiban ketika menerima aduan dari masyarakat.

Dinas sosial sebelumnya telah melakukan penertiban anak jalanan yang di akhiri dengan kericuhan. Rasia ini dilaksanakan untuk menertibkan beberapa orang dewasa yang diduga sengaja mempekerjakan anak kecil sebagai anak jalanan guna mendapatkan sejumlah uang yang dikumpulkan anak jalanan dan disetorkan kepada orang dewasa tersebut. Keadaan anak jalanan ini tentu dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar alun-alun Kota Parepare.⁹

Fenomena terkait anak jalanan juga dialami di Kota Parepare. Dari observasi penulis di Lapangan Andi Makkasau, tampak anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang tisu. Alasannya adalah mereka diminta oleh orang tua untuk berjualan tisu agar bisa membantu keluarga mereka. Anak-anak pada usia mereka seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya. Namun, karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak mampu akibat kemiskinan, mereka terpaksa berjualan tisu di jalanan. Melihat fenomena ini, perhatian dari berbagai pihak menjadi

⁸ Muhammad Tohir, Data BPS, Kemiskinan di Parepare Meningkat, Ini Pandangan Akademisi UM Parepare, <https://www.pijarnews.com/data-bps-kemiskinan-di-parepare-meningkat-ini-pandangan-akademisi-um-parepare/>, Diakses pada Tanggal 03 November 2024.

⁹ Liputan 6, Penertiban Anak Jalanan di Alun-alun Kota Parepare Berujung Ricuh | Liputan 6, <https://www.youtube.com/watch?v=JX4mwlm0mJ0>, Diakses pada Tanggal 03 November 2024.

sangat penting. Pihak-pihak tersebut termasuk pemerintah, pemangku kepentingan, organisasi, dan komunitas tertentu yang memiliki peran dalam menangani masalah anak jalanan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, sampai saat ini belum dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan ini karena banyak nya masalah yang terdapat pada Anak Jalanan, terutama dari segi ekonomi dan juga bahkan pendidikan mereka sehingga Anak Jalanan tersebut bergelut di jalanan dan menghabiskan sisa waktunya yang seharusnya mereka berada di rumah atau bahkan di sekolah dengan menempuh pendidikan dengan baik dan belajar dengan giat.

Berdasarkan masalah yang ada di atas maka penulis ingin meneliti tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak jalanan di kota Parepare, apakah dinas sosial telah melaksanakan tugas dan fungsi nya untuk menangani permasalahan anak jalanan di kota parepare. Merujuk pada latar belakang yang ada, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui **“Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan sosial anak jalanan di Kota Parepare?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam penanganan anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan sosial anak jalanan di kota parepare.
2. Untuk mengetahui peran dinas sosial kota parepare dalam penanganan anak jalanan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Dinas Sosial Kota Parepare melaksanakan peranannya dalam penanganan anak jalanan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman

tentang strategi dan metode yang efektif dalam menangani masalah anak jalanan.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan anak jalanan dan masalah sosial lainnya. Hal ini dapat membantu pemerintah dan lembaga sosial dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk menghindari pengulangan penelitian. Menurut penelusuran referensi yang dilakukan penulis, beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian penulis. Fokus penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare.

Penelitian pertama pada tahun 2023 dilakukan oleh Ajurana Anggriana dengan judul skripsi “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Belajar Cinta Damai Di Kecamatan Ujung Kota Parepare” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan Rumah Belajar Cinta Damai dalam upaya pemberdayaan anak jalanan serta untuk mengetahui bentuk-bentuk program pemberdayaan yang dilakukan. yang menunjukkan hasil bahwa peranan yang dilakukan Rumah Belajar Cinta Damai dalam upaya pemberdayaan anak jalanan yaitu memberikan wadah bagi anak jalanan mengembangkan potensinya melalui program literasi, pendidikan akhlak serta penghubung dengan jaringan sosial yakni Mahasiswa/Alumni juga Dosen IAIN Parepare, Mahasiswa BKP UNM, Puspaga Parepare, dan Seniman Batik Rahayu, Partinah. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan Rumah Belajar Cinta Damai yaitu program di bidang pendidikan, agama, ekonomi, dan kesehatan.¹⁰

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ajurana Anggriana dengan penelitian ini adalah pembahasan pada penelitian Ajurana Anggriana mengenai peranan yang dilakukan Rumah Belajar Cinta Damai dalam upaya pemberdayaan anak jalanan sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Parepare. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan

¹⁰ Anggriana, “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Belajar Cinta Damai Di Kecamatan Ujung Kota Parepare.”

pembinaan dan penanganan anak jalanan.

Penelitian kedua pada tahun 2015 dilakukan oleh Fikriryandi Putra, dkk dengan judul “Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penanganan anak jalanan telah dilakukan yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan rumah singgah. Rumah singgah menggunakan pendekatan *centre based program* dengan fungsi intervensi *rehabilitatif*. Meskipun demikian Rumah Singgah juga menggunakan pendekatan *community based* dan *street based* yang tercermin dalam beberapa program dan kegiatannya yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan mencakup sasaran yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan sosial anak jalanan dengan meningkatkan kemampuan dirinya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendidikan moral. Hal ini diupayakan untuk bisa mendorong dan menstimulasi supaya anak jalanan tersebut bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, perlindungan, dan bisa melakukan perilaku positif sesuai dengan norma dan etika yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun tahapan pelayanan ataupun kegiatan tersebut adalah penjangkauan, identifikasi, resosialisasi, pemberdayaan dan terminasi. Program pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan sehingga mempunyai kemampuan anak jalanan sehingga mempunyai pengetahuan yang meningkat, dapat mandiri sehingga anak jalanan tidak beraktifitas di jalanan lagi.¹¹

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fikriryandi Putra, dkk dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikriryandi Putra, dkk membahas salah satu indikator yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan anak jalanan sedangkan penelitian ini menganalisis peran Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan secara umum. Persamaan penelitian ini adalah pada pembahasan pemberdayaan anak jalanan.

¹¹ Fikriryandi Putra, Dessy Hasanah, dan Eva Nuriyah, “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah,” *Share Social Work Journal* 5, no. 1 (2015): 181610.

Selanjutnya Penelitian oleh Maulida Oktaviana dkk dengan judul “Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan orang di Desa Rarang Tengah menjadi pengemis dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pengemis di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini mempelajari orang-orang yang menjadi pengemis di Desa Rarang Tengah dan latar belakang bagaimana pemerintah daerah menangani pengemis di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal adalah penyebab anggota masyarakat Desa Rarang Tengah menjadi pengemis. Di Kabupaten Lombok Timur, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pengemis, termasuk menggunakan Dinas Sosial bersama dengan Pemuka Agama, Aparat Desa, dan Tokoh Masyarakat. Untuk menghentikan pengemis dari Desa Rarang Tengah, tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif telah digunakan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah pengemisan muncul kembali dan mengurangi dampak pengemisan pada masyarakat secara keseluruhan, memasyarakatkan kembali pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghargai harga diri, dan memungkinkan pengemis untuk berkembang.¹²

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Maulida Oktaviana dkk dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, pada penelitian yang dilakukan Maulida Oktaviana dkk mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Rarang bisa menjadi pengemis sedangkan penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan. Persamaan penelitian ini adalah pada pembahasan peran Pemerintah Daerah untuk menangani anak jalanan.

¹² Made Ary Meitriana, Anjuman Zukhri, and Maulida Oktaviana, “Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur) Tahun 2012,” *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (2014): 5242.

B. Tinjauan Teori

1. Teori ACTORS

Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay memandang masyarakat sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan. Pendekatan ini berfokus pada pembebasan individu dari kendali yang kaku, memberikan mereka kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian sosial dan etika/moral.¹³

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan melalui teori ACTORS. Pertama, pembangunan harus diarahkan pada perubahan struktural. Hal ini penting karena mengubah struktur dasar sistem akan membantu mencapai tujuan pembangunan secara efektif.

Kedua, pembangunan bertujuan untuk memerdayakan masyarakat agar bisa memecahkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Langkah ini melibatkan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Ketiga, pembangunan harus diarahkan pada koordinasi yang baik. Upaya penguatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa perspektif: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; kedua, meningkatkan kapasitas pembangunan masyarakat melalui berbagai dukungan finansial, pelatihan, infrastruktur, sarana fisik dan sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga, melindungi yang rentan dan memihak mereka untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keyakinan ini harus diperkuat dan dipupuk

¹³ Karjuni Dt Maani, "Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Demokrasi* 10, no. 1 (2011).

melalui usaha sungguh-sungguh. Kerangka pemberdayaan dapat dikenal dengan singkatan “ACTORS”.¹⁴

Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan kerangka kerja ACTORS mencakup beberapa poin:

1. *Authority*: Masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri, sehingga mereka merasa bahwa perubahan adalah hasil dari keinginan mereka untuk menuju perbaikan.
2. *Confidence and Competence*: Meningkatkan rasa percaya diri dengan menunjukkan kemampuan mereka untuk mengubah keadaan.
3. *Trust*: Menumbuhkan keyakinan bahwa mereka memiliki potensi untuk melakukan perubahan
4. *Opportunities*: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih apa yang mereka inginkan, sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada.
5. *Responsibilities*: Perubahan harus dilakukan melalui pengelolaan yang penuh tanggung jawab untuk mencapai perbaikan.
6. *Support*: Dukungan dari berbagai pihak sangat penting, termasuk dukungan ekonomi, sosial, budaya, serta dari berbagai stakeholders seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam konteks negara-negara berkembang, peran pemerintah sangatlah penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki tiga peran utama:

- a. Menggali dan menggerakkan sumber daya: Mengombinasikan tenaga kerja, biaya, peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah.

¹⁴ Muhammad Fadeli and Lailatul Musyarofah, “Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 6, no. 1 (2022): 24–38.

- b. Memberi bimbingan dan bantuan teknis: Memfasilitasi masyarakat agar mampu melaksanakan perencanaan secara mandiri melalui tahapan dari perencanaan untuk masyarakat hingga perencanaan oleh masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat: Memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan keberhasilan pembangunan.

Dengan kerangka kerja “ACTORS” ini, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengacu pada aspek internal dan eksternal, di mana pemerintah dan organisasi non-pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam proses tersebut.

2. Teori pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut KBBI memiliki arti sebuah proses atau cara untuk memberdayakan. Pemberdayaan bisa juga di definisikan sebagai suatu metode untuk mendapatkan daya, kekuatan dan juga keterampilan dari seseorang yang berdaya kepada individu yang belum memiliki kekuatan atau daya.

Pemberdayaan menurut Prijono, S Onny dan Pranarka di dalam buku model pemberdayaan masyarakat terpadu yaitu merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok kerja serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial.¹⁵

Kementerian Sosial mendefinisikan Pemberdayaan sebagai cara untuk membangun kemampuan seseorang dengan mengajak, memajukan dan membangkitkan kesadaran seseorang akan potensi yang dia miliki dengan berusaha

¹⁵ Saifuddin Yunus, Fadli Suadi, Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Bandar Publishing, 2017).

untuk membantu mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat harus memiliki program untuk membantu agar masyarakat itu berdaya. Menurut Chambers, program pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centred, participatory, empowering and sustainable*.¹⁶ Dalam upaya memberdayakan masyarakat proses yang harus dilalui, proses pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.¹⁷ Kementerian sosial mengklasifikasikan proses pemberdayaan yang perlu dikaji menjadi tiga tahapan :

- a. *Enabling* yaitu memberikan situasi yang bisa membangkitkan kemampuan yang dimiliki masyarakat itu dapat berkembang. Anggap saja bahwa semua individu itu memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan dan tidak ada masyarakat yang tidak memiliki potensi atau daya.
- b. Pemberdayaan yaitu penguatan kemampuan atau keterampilan yang telah dimiliki masyarakat melalui beberapa tindakan nyata yang membuka berbagai peluang bagi masyarakat sehingga dapat memperkuat kemampuannya dengan tujuan agar masyarakat lebih berdaya. Hal terpenting di dalam pemberdayaan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti permodalan, teknologi, informasi, termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dapat dijangkau oleh lapisan terbawah. masyarakat.
- c. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dapat disimpulkan bahwa cara-cara pemberdayaan yang dilakukan

¹⁶ Imas Siti Jubaedah, Dadang Kuswana, dan Putri Diesy Fitriani, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 4 (2022).

¹⁷ Rizwan Darmawansyah, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 138–49.

pada intinya untuk memberikan sebuah penekanan pada pengambilan keputusan dibuat oleh kelompok masyarakat yang berlandaskan kemampuan, keahlian yang dimiliki masyarakat agar masyarakat itu bisa memiliki daya dan juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik secara internal maupun eksternal, misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Pemberdayaan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat hidup lebih baik lagi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial pada tatanan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.¹⁸

Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dipahami, diperhatikan, dan dipecahkan. Kendala-kendala ini berupa struktur yang menindas (kelas, ras/etnis), bahasa, pendidikan, mobilitas pribadi dan dominasi para elite dalam struktur kekuasaan masyarakat. Perlu dipahami oleh pekerja sosial bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata power yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana proses pelaksanaan Dinas Sosial Kota Medan dalam

¹⁸ Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Alfabeta, 2013).

¹⁹ Zubaedi, "Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik," *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik (1st Ed.)*, n.d.

pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Medan Tembung, agar menjadi penerus Kota Medan yang berpendidikan dan berguna.

Menurut Siti Aminah istilah pemberdayaan terdengar, bergaung, dan digunakan dimana-mana, bahkan untuk tetap hidup seringkali dilekatkan kata pemberdayaan, sehingga dikenal “pemberdayaan lahan tidur”. Pemberdayaan akar katanya berasal dari daya atau power. Pemikiran modern tentang power pertama kali muncul dalam tulisan Niccollo Machiavelli dalam *The Prince*, diawal abad ke-6, dan Thomas Hobbes dalam *Leviathan* pada pertengahan abad ke-17. Representasi adanya power tampak pada posisi, pengambilan keputusan, dan pengaruh. Dengan power yang dimiliki, seseorang atau sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan dan menemukan solusi atas masalah kehidupan.²⁰

Dengan demikian, pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses sharing power, peningkatan kemampuan dan penetapan kewenangan. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja.

²⁰ Siti Aminah, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan daya saing*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014)

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.

Pemberdayaan mengandung pengertian bagaimana mendorong dan memotivasi daya atau potensi yang ada pada manusia, serta bagaimana membangkitkan kesadaran akan sumber daya itu menjadi berdaya atau mempunyai daya/kemampuan untuk menjangkau segala sesuatu dan dilakukan dengan bertanggungjawab serta dapat menunjang kehidupannya. Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita dapat dilihat melalui beberapa sisi yakni:

- 1) Bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang ada dikembangkan. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Bagaimana memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan ini menyangkut langkah nyata untuk menyediakan berbagai masukan dan membuka akses ke dalam berbagai peluang untuk menjadi berdaya. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat dalam hal ini anak jalanan adalah bagaimana memberikan motivasi dan kesempatan kepada setiap anggota anak jalanan untuk dapat melakukan aktivitas produktif sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Dalam konteks pemberdayaan itu peran pemerintah melalui kantor Dinas Sosial makin perlu digalakkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yakni sikap mandiri, agar anak-anak jalanan dapat menapaki masa depan yang lebih cerah dan maju. Ada berbagai upaya dalam pemberdayaan anak jalanan. Upaya pemberdayaan anak jalanan dapat berbentuk melalui program-program seperti:

- 1) *Street Based* Pendekatan dijalanan untuk menjangkau dan mendampingi anak jalanan agar mengenal, mempertahankan relasi dan komunikasi serta

²¹ Nanih Machendrawaty and Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* (PT Remaja Rosdakarya Offset–bandung, 2001).

melakukan penanganan di jalan seperti konseling, diskusi, permainan literacy dan pemberian informasi. Orientasi Street based diarahkan pada upaya menangkal pengaruh- pengaruh negatif jalanan dan membekali anak jalanan dengan nilai-nilai dan wawasan positif. Seperti Mobil Sahabat Anak.

- 2) *Centre based* Pendekatan yang memposisikan anak jalan sebagai penerima pelayanan di suatu center atau pusat kegiatan dan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selama berada di center ia akan memperoleh pelayanan sampai mencapai tujuan yang dikehendaki. Seperti Boarding house atau panti.
- 3) *Family and Community based* Pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat yang bertujuan mencegah anak-anak turun ke jalan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. Family dan Community based mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran dan tanggungjawab dan partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan.²²

b. Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh sebab itu setiap pelaksanaannya perlu di landasi dengan strategi demi keberhasilan untuk membentuk anak jalanan yang berpotensi dan bermasa depan. Pranarka & Vidhyandika menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

²² Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Citra Aditya Bakti, 1999).

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.²³

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.²⁴

Pemilihan cara/teknik ini tentu saja akan menentukan keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Adapun cara/taktik yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan, respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pihak dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.
- 2) Cara pendekatan dengan cara penyampaian pesan melalui socialization dan extension education terutama pada anak jalanan tentang pentingnya merubah perilaku yang negatif dan positif yang di dasarkan atas kesadarannya sendiri, agar masyarakat dapat menerima mereka kembali di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Cara penyampaian melalui diskusi yang terfokus pada kelompok, dengan terfokus pada kelompok, serta melibatkan ketua kelompok anak jalanan, anggota anak jalanan, agen perubahan dan pihak yang memiliki interest

²³ Aziz Muslim, *Metedologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras Kompleks POLRI Gowok Blok D 2 No 186, 2009).

²⁴ Aziz Muslim, “Metedologi Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Teras Kompleks Ri Gowok” (Hal, 2009).

terhadap masalah anak jalanan. Dikominikasikan tentang kondisi yang terkait dengan perilaku yang ingin dirubah atau dengan kekurangan yang dimiliki anak.

- 4) Cara penyampaian dengan cara massal/umum yaitu memobilisir lingkungan disekitar anak jalanan, mulai dari keluarga, kelompok, dan lingkungan di sekitar anak jalanan.²⁵

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan membangkitkan kesadaran dan memotivasi sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melaksanakan perubahan perilaku untuk menuju ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu petugas yang memberdayakan individu, masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebutkan sebagai agen.²⁶

3. Teori Struktural-Fungsional

Pada teori ini, masyarakat dinilai sebagai suatu kelompok individu yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh, teori fungsional berpedoman pada syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang digunakan dengan menganut sebuah sistem untuk terus bertahan, selain itu masyarakat juga mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan keepakatan antar anggotanya, dan memiliki kaitan mengenai kontribusi dalam hal ini terkait “peran dan status” yang dijalankan oleh individu

²⁵ www.Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, diakses pada 2018 22:08 Maret

²⁶ Arifin Saleh and Mislan Sihite, “Strategi Komunikasi Untuk Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 98–105.

maupun institusi terkait dalam keberlangsungan didalam lingkungan masyarakat. Parsons memaparkan bahwa ada empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan” yang diperlukan dan menjadi ciri bagi seluruh sistem berupa adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola di dalam sebuah sistem.

Teori struktural fungsional, masyarakat adalah sebuah sistem sosial mencakup berbagai macam bagian atau susunan yang saling berhubungan dan saling berkesinambungan dalam menciptakan keseimbangan. Perubahan yang terdapat pada satu bagian tentu akan menciptakan perubahan terhadap bagian yang lain. Sebaliknya jika struktur tidak fungsional, maka perubahan tidak akan pernah terbentuk dan hilang secara perlahan. Teori struktural fungsional cenderung untuk menilai satu sudut pandang melalui peranan satu sistem atau kegiatan terhadap sistem yang lain dan oleh sebab itu tidak melihat sudut pandang lain yang memungkinkan bahwa suatu aktivitas atau suatu sistem dapat berjalan dan bertolak belakang dengan fungsi yang lain dalam suatu sistem sosial. Teori fungsionalisme struktural menilai masyarakat sebagai suatu individu yang stabil dengan lebih dominan menuju ke arah keseimbangan. Teori struktural fungsional dibagi menjadi empat aspek, yaitu:

- a. Setiap masyarakat meliputi berbagai susunan yang terstruktur secara relatif, tetap dan stabil
- b. Berbagai elemen yang terstruktur tersebut saling berintegrasi dengan baik
- c. Setiap bagian dalam struktur memiliki fungsi, yaitu menyalurkan peranan pada stabilnya struktur tersebut sebagai suatu sistem
- d. Setiap struktur yang fungsional didasarkan pada suatu konsensus nilai diantara para anggota masyarakat.

Stratifikasi adalah suatu sistem sosial yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Penerapan teori struktural fungsional dalam ilmu sosiologi pendidikan menjabarkan bahwa sosiologi biologis menilai perubahan selalu bergerak menuju ke

arah keseimbangan.²⁷ Pendekatan fungsional struktural terbentuk dengan sudut pandang yang menyajikan persamaan antara masyarakat dengan organisme biologis, yang maknanya adanya suatu ketergantungan dan keterkaitan anatar organ tubuh yang satu dengan organ tubuh yang lain dan hal ini menyerupai fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Menurut sudut pandang ini dijelaskan mengenai persamaan dua hal tersebut, yaitu:

1. Masyarakat itu berproses untuk tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang terkumpul menjadi satu kesatuan yang.
2. Dalam Proses untuk menjadi masyarakat yang terhimpun menjadi satu kesatuan, masyarakat akan tumbuh dan berkembang secara perlahan.
3. Meskipun suatu institusi sosial melakukan kerjasama dengan banyak institusi lainnya, tetap diterapkan karena seluruh institusi tumbuh dan berkembang dari institusi yang sama.
4. Sama halnya dengan organisme biologis, pada bagian dalam organisme sosial memiliki sistem sendiri dimana pada hal tertentu dapat berdiri sendiri.

Beberapa hal inilah yang menjadi awal mula terciptanya fungsionalisme struktural yang memberikan pengaruh dalam sosiologi Amerika yang memberi dampak besar pada pemikiran dari Talcott Parsons yang selanjutnya oleh parsons dikembangkan lagi menjadi beberapa pemaparan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat harus dinilai sebagai sebuah sistem yang memiliki kaitan ataupun hubungan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu hubungan yang saling mempengaruhi disebut juga hubungan timbal balik.
- 2) Meskipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan hasil yang maksimal, secara umum sistem sosial memiliki sifat dinamis dan bergerak ke arah yang stabil.

²⁷ Rahmi Juwita et al., "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan," *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (2020): 1–8.

- 3) Sistem sosial bergerak ke arah yang stabil meskipun mengalami konflik, disfungsi, dan penyimpangan.
- 4) Perubahan yang terdapat pada sistem sosial terjadi secara perlahan melalui proses adaptasi dan tidak berlangsung dalam waktu yang singkat.
- 5) Faktor utama agar untuk tercapainya integrasi pada suatu sistem sosial adalah mufakat di dalam suatu kumpulan masyarakat terkait nilai tertentu yang ada didalam masyarakat.²⁸

Dalam penjelasan yang lebih rinci, Fungsi manifest merupakan fungsi yang disepakati, laten adalah yang tidak disepakati. Oleh karena itu, berbagai hal yang tidak relevan dan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Gambaran tentang fungsi manifest dan laten telah meminimalisir kekurangan bahwa fungsi selalu terdapat dalam susunan struktur. Dengan memberikan pengakuan tentang struktur sosial dapat menciptakan potensi bagi perubahan sosial. Secara umum, berbagai prinsip pokok fungsionalisme terdapat berbagai macam bagian, diantaranya adalah:

- a. Masyarakat adalah suatu sistem yang terstruktur yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling ketergantungan, dan setiap bagian memberikan pengaruh secara rinci terhadap berbagai bagian yang lain.
- b. Setiap bagian dari masyarakat populer karena setiap bagian tersebut berfungsi penting dalam menjaga eksistensi dan kestabilan masyarakat secara menyeluruh, Oleh karena itu eksistensi pada satu bagian tertentu dari masyarakat mampu dijelaskan jika fungsinya untuk masyarakat pada umumnya dan dapat diidentifikasi secara penuh.
- c. Seluruh elemen masyarakat memiliki mekanisme untuk menjalankan hal yang integritas bagi individu, yaitu mekanisme yang mampu menggabungkan berbagai bagian yang terpecah menjadi satu komponen dan diantara berbagai

²⁸ Amriyan Roby, "PERAN RUMAH RAMAH ANAK BUSSAINA DALAM MEMBERIKAN PENGUATAN KEAGAMAAN DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

macam bagian didalamnya terdapat salah satu bagian penting yaitu komitmen berbagai anggota masyarakat kepada susunan kepercayaan dan nilai yang telah disepakati bersama

- d. Masyarakat lebih cenderung mengarah kepada situasi homeostatis, dan hambatan di dalam salah satu bagiannya cenderung mengakibatkan penyesuaian terhadap berbagai bagian yang lain agar terbentuk harmoni dan stabilitas.
- e. Perubahan sosial suatu aktivitas yang tidak biasa terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Namun, , jika fenomena tersebut terjadi, maka perubahan secara umum akan mengarah kepada berbagai konsekuensi yang bersifat menguntungkan bagi seluruh elemen masyarakat.²⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada bantuan eksternal, tetapi juga pada pengembangan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.³⁰

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya tawar masyarakat. Dengan memberdayakan individu dan kelompok dalam masyarakat, mereka dapat lebih mampu mengelola sumber daya yang ada dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang

²⁹ Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga,” *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 2 (2017): 171–84.

³⁰ Andi Nur Aini, “Partisipasi PC Fatayat NU (Nahdatul Ulama) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2024).

inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek *enabling* yang menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi masyarakat. Kedua, aspek *empowering* yang memperkuat kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, aspek *protecting* yang berfokus pada perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan.³¹

Proses pemberdayaan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah penyadaran, di mana masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan potensi mereka. Selanjutnya adalah pengkapasitasan atau *capacity building*, di mana pengetahuan dan keterampilan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tahap terakhir adalah pendayaan (*empowerment*), di mana masyarakat diberikan otoritas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan.

Metodologi pemberdayaan masyarakat juga harus bersifat partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Sementara itu, pendekatan kolaboratif membangun jaringan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberdayaan.

Peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan ini. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan menciptakan kebijakan yang mendukung inisiatif pemberdayaan. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai fasilitator yang membantu

³¹ St Nasira, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU (Studi Kasus Di Yayasan LP2EM Kota Parepare)" (STAIN Parepare, 2017).

menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan lokal serta memberikan dukungan teknis kepada masyarakat.³²

Akhirnya, evaluasi dan monitoring menjadi bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan program dan mengidentifikasi area perbaikan. Monitoring bertujuan untuk menilai dampak dari program pemberdayaan terhadap kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, proses pemberdayaan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

2. Masalah Anak Jalanan

Masalah anak jalanan merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di tempat-tempat umum. Mereka sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu dan mengalami berbagai bentuk penelantaran serta kekerasan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.³³

Faktor penyebab anak menjadi anak jalanan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: mikro, meso, dan makro. Pada tingkat mikro, keputusan anak untuk turun ke jalan sering kali disebabkan oleh pengalaman pribadi seperti kekerasan dalam keluarga, penelantaran, atau keinginan untuk mencari kebebasan. Di tingkat meso, lingkungan sosial berperan penting; anak-anak sering merasa lebih nyaman berada di jalanan dibandingkan di rumah, terutama jika mereka mengalami stres di lingkungan keluarga. Sementara itu, pada tingkat makro, faktor struktural seperti kemiskinan, urbanisasi yang cepat, dan kebijakan pembangunan yang tidak merata berkontribusi besar terhadap kondisi yang memaksa anak-anak untuk mencari nafkah di jalan.

³² Sitti Hadjerah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2022).

³³ Silmi Qurota Ayun Ariadin, "Peran Komunitas Siguru Dalam Membentuk Karakter Reigius Sosial Anak Jalanan Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2023).

Dampak dari kehidupan di jalan sangatlah serius dan beragam. Anak-anak jalanan menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang tinggi. Mereka rentan terhadap penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat serta kekurangan gizi. Selain itu, masalah kesehatan mental seperti stres dan trauma juga sering dialami oleh anak-anak ini. Dampak lainnya adalah pendidikan, banyak anak jalanan yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperbaiki keadaan hidup di masa depan.

Stigma sosial juga menjadi tantangan besar bagi anak jalanan. Mereka sering dicap sebagai pengganggu ketertiban umum, yang dapat memperburuk kondisi sosial mereka dan menghambat upaya rehabilitasi. Stigma ini menciptakan jarak antara anak-anak ini dengan masyarakat luas, sehingga mereka sulit mendapatkan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. Hal ini menambah kesulitan dalam upaya reintegrasi sosial bagi mereka.³⁴

Berbagai pendekatan telah diterapkan untuk menangani masalah anak jalanan. Pendekatan *street-based* melibatkan intervensi langsung di lokasi keberadaan anak-anak tersebut dengan memberikan dukungan sosial dan pendidikan. Pendekatan *centre-based* menampung anak-anak di panti rehabilitasi untuk memberikan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat mandiri di masa depan. Selain itu, pendekatan *community-based* melibatkan masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus ke kehidupan jalanan.

Masalah anak jalanan adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor individu, keluarga, masyarakat, dan struktur sosial. Penanganannya memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab dan dampak dari fenomena ini, kita dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak jalanan.

³⁴ Nurhalisa, "Peran Dinas Sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Parepare (Perspektif Siyash Syar'iyah)." (IAIN Parepare, 2023).

3. Fungsi dan Peran Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang melapor kepada Kepala Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial mencakup membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta melaksanakan kewenangan desentralisasi. Fungsi utama Dinas Sosial terdiri dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi kegiatan sosial, serta pengendalian dan evaluasi program.³⁵

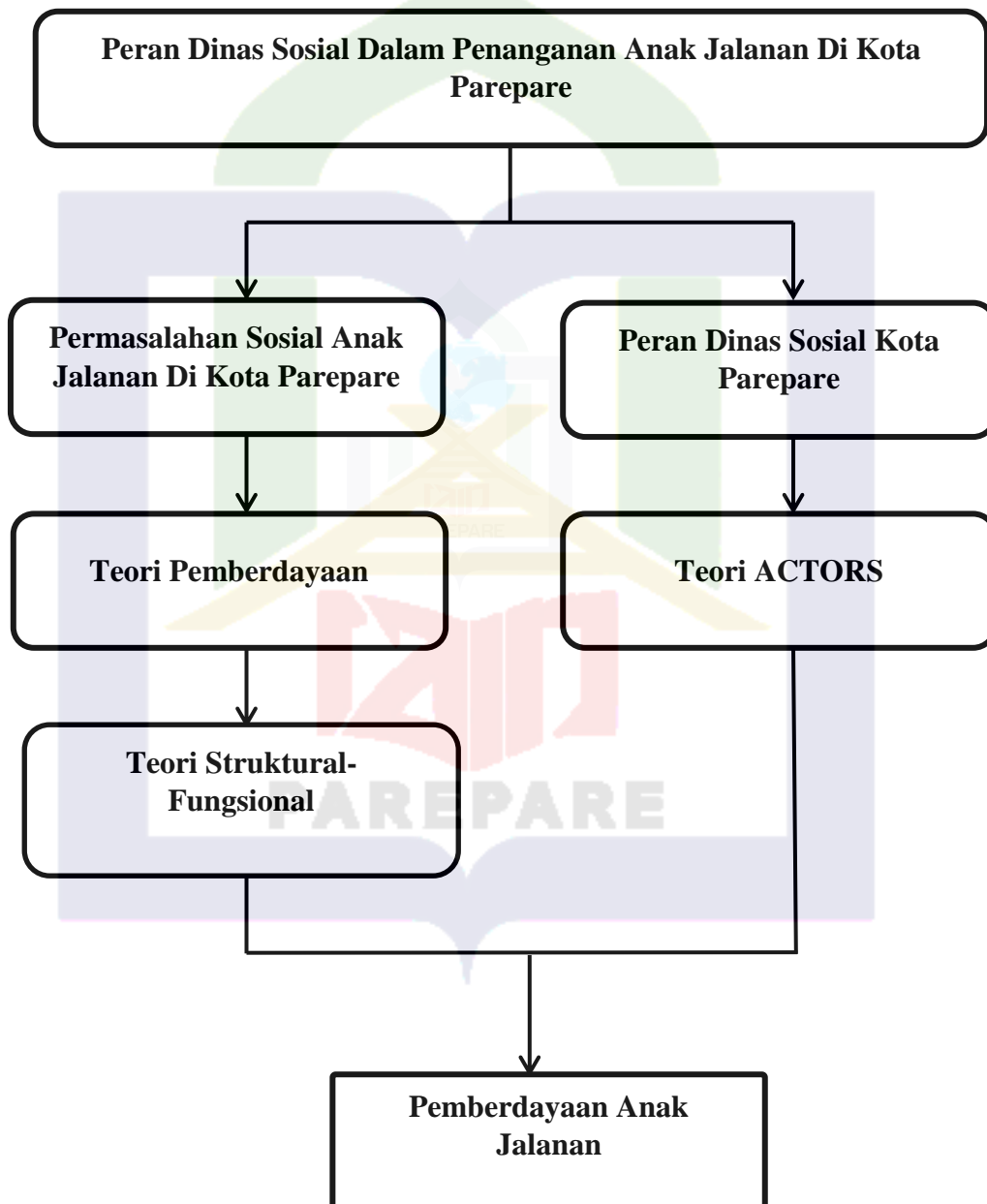
Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Sosial memberikan berbagai layanan di beberapa bidang, termasuk pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan masyarakat, rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, perlindungan dan jaminan sosial untuk korban bencana, serta penanganan fakir miskin melalui identifikasi dan penyaluran bantuan.

Peran strategis Dinas Sosial sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan memberikan pelayanan rehabilitasi dan pembinaan. Dinas ini berfungsi sebagai fasilitator kesejahteraan sosial dengan memfasilitasi akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan mengoordinasikan program-program lintas sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Melalui berbagai fungsi dan perannya, Dinas Sosial berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik.

³⁵ Hadijah, "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak" (IAIN Parepare, 2024).

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini menjelaskan beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka pikir untuk mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Syafrida Hafni Sahir dalam buku Metodologi Penelitian, mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berdasarkan suatu fenomena atau menjelaskan suatu fenomena dari sudut pandang yang mendalam dan terperinci dengan pendekatannya dan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa secara lisan. Penelitian kualitatif membutuhkan pengetahuan yang komprehensif dari peneliti, yang akan terlibat dalam proses wawancara langsung dengan subjek penelitian. Metode deskriptif mendeskripsikan keadaan, kejadian yang terjadi pada masa sekarang yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian tanpa mengubah, menambah, memanipulasi objek dan lokasi penelitian.³⁶

Menurut Creswell, metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena atau kejadian tertentu dengan detail dan mendalam.³⁷

Metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek penelitian.³⁸

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

³⁷ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

³⁸ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kawasan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang terletak di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Alasan penulis memilih lokasi ini karena sebelumnya penulis pernah melihat banyak Anak Jalanan yang terlantar di pinggir jalan atau di lampu merah di temui kadang mereka menjual tissu atau meminta-minta di jalan pada saat lampu merah sehingga penulis mengangkat masalah ini, yang berlokasi di kawasan monumen cinta sejati habibie ainun.

2. Waktu Penelitian

Telah menyelesaikan proposal studi, mengikuti seminar, dan telah diberikan izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian selama kurang lebih 4 bulan, dimana penulis akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat digunakan sebagai pendukung hasil penulis. hingga memperoleh semua data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan relevansi dan batasan dalam bidang kajian yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan. Untuk membantu penulis agar lebih terarah dan efektif, dilakukan pembatasan pada bidang kajian permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran yang dimainkan oleh dinas sosial dalam menangani masalah anak jalanan di kota Parepare, dengan mengkaji berbagai aspek intervensi dan program yang diterapkan untuk mendukung serta melindungi anak-anak yang hidup di jalanan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, responden, dan sumber lainnya. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang menjadi acuannya.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi atau hasil wawancara dari informan yang berpengaruh selama proses pengumpulan data. Informan juga disebut sebagai *key member* yang memegang kunci utama sumber data penelitian ini dan dianggap paham. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer pihak Dinas Sosial Kota Parepare, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dan Masyarakat Mengenai "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare".

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain atau instansi, seperti dokumen, baik dalam bentuk laporan maupun data sekunder lainnya. Informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial juga akan mencakup data tertulis seperti dokumen-dokumen, dan program-program mereka. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti akan menggunakan situs web, brosur, dan jurnal untuk mencari profil kegiatan yang terkait dengan "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare"

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan tahapan penting dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan pada fenomena yang diteliti dengan pencatatan secara sistematis. Dalam pelaksanaan observasi, mata dan telinga berperan penting dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu kedua indra tersebut harus dalam keadaan sehat. Teknik observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan nonpartisipatif. Pada observasi partisipatif peneliti dapat ikut serta dalam kegiatan yang sedang diamati. Sedangkan dalam observasi nonpartisipatif peneliti hanya mengamati kegiatan yang sedang tanpa ikut serta dalam kegiatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yakni pihak yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan pihak yang menjawab pertanyaan dari pewawancara (narasumber). Wawancara ialah tahapan untuk memperoleh informasi demi kepentingan tujuan penelitian dengan metode tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber menggunakan panduan wawancara.

Berikut jumlah informan dan keterangan terkait dengan Wawancara:

NO.	INFORMAN	KETERANGAN
1.	Rusdin, S.Sos.	Staf Dinas Sosial Kota Parepare
2.	Zulkhaidir, S.Sos.	Staf DP3A Kota Parepare
3.	Nur Rahma, S.H., M.H.	Staf DP3A Kota Parepare
4.	Sri Putrida, S.Sos., M.M.	Staf DP3A Kota Parepare
5.	Zainal Baktiar	Masyarakat (Tukang Ojek)
6.	Alwan Umar	Masyarakat (Tukang Ojek)
7.	Muhammad Aidil, S.H.	Masyarakat
8.	Muhammad Nur Syafi'I	Masyarakat
9.	Aidil Dzul Ikrom, S.Sos.	Masyarakat
10.	Muhlis	Masyarakat
11.	Nirma	Anak Jalanan
TOTAL		11

Tabel 3.1 Jumlah Informan dan Keterangan terkait dengan wawancara

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen terkait penelitian yang diteliti. Menurut Sugiono dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, karya monumental.

Dokumen dalam bentuk tulisan seperti kebijakan, peraturan, sejarah, biografi, catatan harian. Dokumen dalam bentuk gambar seperti foto, gambar, sketsa gambar

hidup dan lainnya. Dokumen dalam bentuk karya misalnya film, patung, dan lain-lain.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Pada metode triangulasi peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih kuat. Menurut Susan Stainback tujuan triangulasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan sebelumnya, bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena.

F. Uji Keabsahana Data

Keabsahan data bertujuan untuk mengevaluasi data yang didapatkan sekaligus membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility*

Pada penelitian kualitatif, *credibility* digunakan untuk menjelaskan bahwa data yang didapatkan peneliti menggambarkan situasi objek yang sebenarnya.

2. *Transferability*

Transferability atau keteralihan berarti hasil temuan penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada kondisi lain yang memiliki konteks dan karakteristik yang relatif sama.

3. *Dependability*

Pengujian *dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan meninjau atau mengevaluasi keseluruhan proses penelitian, dimulai dari menentukan permasalahan, menentukan sumber data, mengumpulkan data, melakukan analisis data, memeriksa kebenaran data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dapat dianggap reliable apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses yang bisa dilakukan oleh pembimbing atau auditor yang independen.

4. *Confirmability*

Pengujian *confirmability* disebut juga dengan pengujian objektivitas penelitian kualitatif. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian disetujui oleh banyak pihak. Uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability* sehingga pengujian dapat dilaksanakan secara bersamaan. Uji *confirmability* mengacu pada pengujian temuan penelitian dengan proses yang diterapkan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan mengatur data hasil wawanara, observasi, dan lain-lai secara sistematis dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap isu yang diteliti dan menyajikannya kepada orang lain. Analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna agar pemahaman peneliti meningkat. Analisis data dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi kasar yang diperoleh dari catatan di lapangan. Proses ini terjadi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul. Reduksi meliputi merangkum data, menelusuri tema, melakukan pengkodean, membuat kelompok dengan cara data diseleksi secara ketat, deskripsi singkat, dan mengelompokkan data ke dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat penyusunan informasi, sehingga memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, grafik, matriks, diagram, jaringan dan lain-lain. Penyajian data menggabungkan informasi yang disusun ke dalam format yang konsisten dan mudah diakses, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi dan apakah kesimpulan peneliti benar atau sebaliknya atau menyoediki kembali.

3. Verifikasi Data

Setelah reduksi dan penyajian data, berikutnya adalah verifikasi data, yaitu memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahan data. Pada tahap ini, peneliti mengkaji kembali keabsahan data dengan cara mendengarkan kembali hasil dari wawancara dan membandingkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis peneliti. Pada tahap ini, juga dilakukan penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara apabila bukti bukti data tidak kuat. Akan tetapi, jika data yang diperoleh terbukti kuat valid dan tidak berubah-ubah saat mengumpulkan data maka kesimpulan kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Permasalahan Sosial Anak Jalanan Di Kota Parepare

Permasalahan anak jalanan di Kota Parepare merupakan cerminan dari berbagai ketimpangan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat urban. Keberadaan mereka tidak semata-mata karena keinginan pribadi untuk berada di jalanan, melainkan lebih disebabkan oleh faktor struktural yang memaksa, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, disfungsi keluarga, dan rendahnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan anak jalanan bukan sekadar masalah individu atau keluarga semata, tetapi menyangkut sistem sosial yang lebih luas.³⁹

Anak jalanan adalah sebuah realitas yang menjadi bagian dari pemandangan kehidupan perkotaan yang secara awam, masyarakat sering mendefinisikan anak jalanan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Mereka sering disebut sebagai pengamen, pemulung, pedagang asongan, pengemis, penjual koran, pengojek payung, penyemir sepatu, tukang parkir, pembersih mobil, joki dan lain sebagainya. Pemberian definisi terhadap anak jalanan yang berbeda-beda ini ternyata terjadi tidak hanya dikalangan individu tetapi juga dikalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat maupun oleh negara. Pendefinisian anak jalanan dengan mudah dapat berbeda-beda.⁴⁰

Salah faktor yang menjadi penyebab banyak anak jalanan yaitu karena faktor ekonomi, yang mana orang tua mereka tidak dapat menghasilkan penghasilan yang cukup untuk keluarga mereka dan akhirnya mempekerjakan anaknya, dengan harapan mereka bisa menghasilkan uang lebih dengan mengandalkan anak-anak mereka, yang

³⁹ Aysha Zalika Ardita Putri Andi, "Permasalahan Anak Jalanan Di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan Di Surabaya)," *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 1, no. 1 (2022): 28–37.

⁴⁰ Putra, Hasanah, and Nuriyah, "Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah."

mana anak mereka ini bisa saja lebih banyak menghasilkan uang dikarenakan akan banyak yang ibah melihat anak kecil yang berjualan di jalanan.⁴¹

Di sisi lain, kehadiran anak jalanan di ruang publik juga memunculkan permasalahan sosial lainnya, seperti gangguan ketertiban umum, penurunan citra kota, serta kecemasan masyarakat terhadap keselamatan anak-anak tersebut. Pemerintah Kota Parepare sendiri melalui Dinas Sosial dan instansi terkait telah berupaya melakukan penjarangan dan pembinaan, namun hasilnya masih belum optimal karena tidak didukung oleh fasilitas seperti balai rehabilitasi khusus anak di tingkat lokal. Akibatnya, upaya penanganan menjadi bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan secara tuntas.

Terdapat beberapa anak jalanan yang rata-rata asalnya dari luar kota seperti kota makassar bahwa anak jalanan ini datang ke kota parepare untuk mencari uang di lampu merah atau pnggir jalan dan mengenai informasi dari masyarakat bahwa anak jalanan tersebut rata-rata berdomisili dari luar daerah dan lebih banyak berasal dari luar ketimbang dari dalam kota dan terkait validasi dengan Dinas Sosial mengenai informasi dari masyarakat terkait dengan banyaknya anak jalanan berasal dari luar kota seperti makassar ketimbang dari dalam kota bahwa informasi tersebut benar adanya, terkait anak jalanan yang berasal dari luar daerah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial anak berasal dan dilakukan pemulangan ke tempat asal sedangkan untuk anak jalanan yang berasal dari dalam kota atau berKTP parepare dilakukan pembinaan berupa bimbingan sosial, mental, dan spritual juga dilakukan bimbingan keterampilan sentra kementerian sosial maupun di UPT Makkareso Maros milik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak jalanan di Kota Parepare bersifat kompleks dan multidimensional. Tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban di lapangan, tetapi juga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari penguatan ekonomi keluarga, pendidikan inklusif, hingga

⁴¹ Ariadin, "Peran Komunitas Siguru Dalam Membentuk Karakter Reigius Sosial Anak Jalanan Kota Parepare."

penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi anak. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut menghabiskan waktu di jalan untuk mengamen, menjual tisu, atau bahkan mengemis. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan fisik mereka karena rentan terhadap kecelakaan lalu lintas dan kekerasan, tetapi juga berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan pendidikan mereka. Banyak dari anak-anak ini tidak lagi mengenyam bangku sekolah secara teratur, bahkan ada yang sama sekali putus sekolah.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Sainal Baktiar menyatakan bahwa:

“Anak jalanan ini sebenarnya mempunyai kemampuan dan keterampilan masing-masing namun anak jalanan ini sering kali berada di jalan sehingga anak jalanan tersebut nyaman mencari sebuah nafkah atau uang baik dengan cara meminta-minta atau menjual sebuah tisu, dan anak jalanan ini bisa memiliki masa depan yang baik karena anak jalanan tersebut memiliki potensi tapi terhalang oleh masalah ekonomi sehingga mereka fokus hanya untuk ke jalan.”

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa anak jalanan ini sebenarnya memiliki potensi dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka menunjukkan kesadaran terhadap kondisi yang mereka alami dan keinginan untuk berubah. Hal ini memperlihatkan bahwa anak jalanan bukanlah individu yang sepenuhnya kehilangan arah, melainkan anak-anak yang berada dalam situasi yang salah dan belum mendapatkan ruang untuk berkembang secara optimal, dan faktor masalah ekonomi sehingga mereka menghabiskan waktunya hanya untuk di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh bapak sainal baktiar, ditemukan bahwa faktor masalah ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak turun ke jalan. Sebagian besar anak jalanan yang diwawancarai menyatakan bahwa kondisi

ekonomi keluarga yang tidak stabil memaksa mereka untuk mencari penghasilan sendiri, baik dengan mengamen, menjual tisu, maupun meminta-minta.

Sebagian dari mereka berasal dari keluarga dengan penghasilan sangat rendah atau bahkan tanpa pekerjaan tetap. Orang tua mereka umumnya bekerja serabutan, seperti buruh bangunan, pemulung, atau tidak bekerja sama sekali. Dalam beberapa kasus, orang tua justru mendorong anak-anaknya untuk ikut bekerja di jalan demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, ada juga anak-anak yang datang dari luar kota, seperti Makassar, dengan harapan dapat memperoleh uang lebih banyak di kota. Namun kenyataannya, mereka justru harus menghadapi kehidupan yang keras di jalan, tanpa perlindungan yang memadai. Banyak dari mereka mengaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus bekerja untuk membantu keluarga.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang berat menjadi faktor pendorong utama anak-anak berada di jalan. Kurangnya bantuan sosial, akses pendidikan, dan lapangan kerja bagi orang tua menjadi masalah mendasar yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan lembaga terkait agar anak-anak ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Hasil wawancara dengan Masyarakat bapak Alwan Umar menyatakan bahwa:

“Anak jalanan seharusnya berada di rumah dan mengikuti pendidikan di sekolah, namun kondisi keluarga yang tidak harmonis membuat mereka merasa lebih nyaman berada di jalan. Disfungsi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan potensi mereka. Akibat permasalahan sosial ini, banyak anak jalanan justru menghabiskan waktunya di jalanan atau di sekitar lampu merah, bukan di lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.”

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa disfungsi keluarga merupakan salah satu penyebab utama mereka berada di jalan. Banyak dari mereka mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengabaian terhadap kebutuhan emosional dan fisik anak. Keinginan mereka untuk bersekolah kembali, memperoleh pelatihan,

dan hidup lebih baik mencerminkan adanya kesadaran dan motivasi internal yang kuat. Dalam konteks ini, pemberdayaan bukan sekedar memberikan bantuan sesaat, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka agar mampu keluar dari kondisi keterbatasan dan membangun masa depan yang lebih layak.

Situasi keluarga yang tidak sehat ini menyebabkan anak kehilangan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan keluarganya. Akibatnya, mereka lebih memilih lingkungan jalanan yang dianggap lebih bebas, meskipun penuh risiko. Hal ini menjadi bentuk nyata dari kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan terhadap anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disfungsi keluarga sangat berkaitan erat dengan munculnya anak jalanan sebagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, upaya penanganan anak jalanan tidak cukup hanya di jalan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan di dalam keluarga, agar anak-anak dapat kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.

Hasil wawancara dengan Masyarakat/pengendara kak Muhammad Aidil, S.H., menyatakan bahwa:

“Anak jalanan ini yang harus nya berada di sekolah untuk belajar namun karena akses terhadap pendidikan menjadi salah satu permasalahan sosial yang mereka hadapi. Banyak dari mereka mengaku tidak sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Alasan utama yang muncul adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, kurangnya perhatian dari orang tua, serta keharusan untuk bekerja demi membantu kebutuhan hidup, sehingga anak jalanan tersebut menghabiskan waktunya hanya untuk di jalan dan merasa lebih nyaman hidup di lingkungan jalanan atau lampu merah.”

Anak jalanan ini sering kita temui di jalanan atau bahkan di lampu merah. Mereka harus menghabiskan hari-hari di jalan untuk mengamen, menjual barang, atau meminta-minta demi mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Situasi ini menyebabkan pendidikan tidak menjadi prioritas dalam kehidupan mereka, padahal mereka memiliki potensi untuk berkembang jika diberikan kesempatan.

Selain itu, wawancara juga menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan sosial yang tidak mendukung turut memperparah kondisi ini. Anak-anak jalanan sering kali tidak mendapatkan dorongan atau motivasi dari orang terdekat untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan ada yang merasa rendah diri karena sudah tertinggal jauh dibandingkan anak-anak seusianya yang masih bersekolah.

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian terhadap pendidikan menjadi salah satu permasalahan sosial utama yang dialami anak jalanan. Banyak dari mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan untuk melanjutkan pendidikan. Akibatnya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di jalan daripada di sekolah, sehingga hak mereka untuk belajar dan berkembang tidak terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, perlu ada peran aktif dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan program pendidikan inklusif dan fleksibel bagi anak-anak jalanan agar mereka tidak terus terpinggirkan.

Hasil wawancara dengan Masyarakat/pengendara kak Muhammad Nur Syafi'I menyatakan bahwa:

“Anak jalanan ini sering kali ditemui di jalanan sehingga anak jalanan ini berada di lingkungan sosial yang tidak mendukung, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi mereka. Anak-anak ini tumbuh di lingkungan yang cenderung abai terhadap keberadaan mereka, bahkan sering mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat sekitar. Banyak dari mereka merasa dijauhi, diremehkan, dan tidak diperlakukan dengan layak, baik di tempat umum maupun saat berinteraksi dengan orang dewasa.”

Berdasarkan ungkapan di atas, bahwa mereka sering dianggap sebagai pengganggu atau beban sosial. Stigma negatif seperti “anak nakal” atau “pemalas” melekat pada diri mereka, tanpa melihat latar belakang kehidupan yang mereka alami. Perlakuan semacam ini membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak dihargai sebagai bagian dari masyarakat.

Tidak hanya itu, lingkungan tempat tinggal mereka pun umumnya tidak kondusif bagi perkembangan anak. Minimnya ruang aman untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi secara positif membuat anak-anak ini semakin terasing dan memilih menghabiskan waktu di jalan. Ketidakhadiran tokoh masyarakat atau figur pendukung yang peduli pada nasib mereka juga memperparah kondisi sosial yang mereka alami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial yang kurang peduli dan cenderung menyudutkan anak jalanan turut menjadi penyebab mereka sulit keluar dari kehidupan jalanan. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan sikap masyarakat, edukasi publik, serta peran aktif lembaga sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi anak-anak yang rentan.

Hasil wawancara dengan Masyarakat/pengendara kak Aidil Dzul Ikrom, S.Sos., menyatakan bahwa:

“Anak jalanan sangat meresahkan masyarakat khususnya bagi pengendara yang lewat atau bahkan singgah di lampu merah, lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk kondisi anak jalanan, namun sayangnya lingkungan sekitar sering kali tidak mendukung keberadaan mereka. Aidil Dzul Ikrom menyampaikan bahwa anak-anak jalanan kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka dianggap mengganggu ketertiban atau sebagai beban sosial, bukan sebagai anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.”

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa Menurut Aidil Dzul Ikrom, stigma negatif tersebut menyebabkan anak jalanan merasa dikucilkan dan tidak diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa sangat sedikit pihak yang mau mendekat dan membantu mereka, baik dalam bentuk perhatian, pendidikan, maupun pembinaan sosial. Lingkungan yang seperti ini justru mendorong anak-anak tersebut untuk tetap berada di jalan, karena mereka merasa lebih bebas dan tidak dihakimi.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial yang tidak mendukung memperkuat keterasingan anak jalanan dan menghambat mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, penuh kepedulian, serta membuka akses bagi mereka untuk kembali mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak.

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.

Hasil wawancara dengan Masyarakat/pengendara bapak muhlis, menyatakan bahwa:

“Anak jalanan ini rata-rata dari luar kota dan jarang dari anak jalanan tersebut berasal dari lokal seperti berasal dari Makassar, anak jalanan ini juga harus ditertibkan supaya mereka ke arah yang lebih baik dan anak jalanan tersebut itu tidak mengganggu namun tujuan anak jalanan ini hanya untuk mencari uang atau nafkah, eksploitasi anak menjadi salah satu permasalahan serius yang mereka alami di kehidupan jalanan. Tidak sedikit anak jalanan yang dipaksa untuk bekerja oleh orang tua, keluarga, atau bahkan pihak lain demi mendapatkan uang. Mereka diminta mengamen, menjual barang-barang kecil seperti tisu, atau bahkan meminta-minta, dengan target tertentu setiap harinya.”

Berdasarkan ungkapan di atas, bahwa eksploitasi tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara emosional. Anak-anak merasa bahwa keberadaan mereka hanya dianggap penting selama mampu menghasilkan uang. Kondisi ini sangat

merugikan perkembangan mental dan emosional mereka, serta membuat mereka semakin jauh dari akses terhadap kehidupan yang layak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan bentuk nyata dari permasalahan sosial yang mengakar pada kehidupan anak jalanan. Untuk mengatasinya, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, agar eksploitasi terhadap anak jalanan bisa keluar dari kehidupan jalanan dan mereka bisa hidup dengan lebih aman dan bermartabat.

Hasil wawancara dengan Nirma anak jalanan, menyatakan bahwa:

“Alasan saya turun ke jalan karena faktor utama yaitu masalah ekonomi atau masalah sehingga saya turun ke jalan untuk mencari uang atau mencari sebuah nafkah, dengan begitu kadang mulai dari siang hingga malam menghabiskan waktunya hanya untuk di jalan. Informasi dari Nirma bahwa : “saya sekolah di Mts DDI Taqwa dan sekarang saya kelas 4 SD dan tempat tinggal saya di bagian pasar senggol.” Sehingga merasa nyaman berada di jalan untuk mencari uang di bagian perempatan jalan atau lampu merah dekat lapangan atau lebih tepatnya di kawasan monumen cinta sejati habibie ainun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nirma, bahwa alasan turun ke jalan karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian terhadap orang tua terhadap anak sehingga anak di terlantarkan untuk turun ke jalanan dan menghabiskan waktunya hanya untuk di jalan dan juga karena kondisi ekonomi dalam keadaan sulit sehingga merasa lebih nyaman untuk mencari uang yang seharusnya mereka berada di lingkungan rumah untuk merasakan hal-hal yang terkait pada kehidupan anak-anak pada umumnya namun karena kondisi dan masalah sosial seperti faktor ekonomi sehingga berada di zona nyaman di lingkungan jalanan. Oleh karena itu terkait masalah sosial anak jalanan bahwa ini termasuk masalah eksploitasi anak dimana orang tua seharusnya mendidik anak, membina anak, dan mengarahkan anak ke arah yang lebih baik untuk masa depan yang cerah, namun karena permasalahan sosial atau eksploitasi sehingga anak jalanan mencari pelarian atau berada di jalanan.

Dapat disimpulkan bahwa, kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit masalah ekonomi tidak hanya memengaruhi kesejahteraan material, tetapi juga berdampak langsung pada struktur dan fungsi keluarga. Disfungsi dalam keluarga Nirma bukanlah semata-mata karena ketidakharmonisan hubungan, tetapi lebih dalam lagi, berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang menekan. Dengan itu

Hasil wawancara dengan staf DP3A ibu Nur Rahma, menyatakan bahwa:

“Anak jalanan seharusnya diberikan pembinaan namun karena faktor-faktor yang menjadi masalah sosial anak jalanan seperti faktor ekonomi, keluarga dan juga kekerasan terhadap anak atau eksploitasi, eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi pada anak jalanan. Banyak anak yang berada di jalanan bukan atas keinginan mereka sendiri, melainkan karena dipaksa oleh orang tua, keluarga, atau pihak tertentu untuk bekerja dan mencari uang.”

Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa anak-anak tersebut turun ke jalan karena masalah ekonomi sehingga anak jalanan ini menghabiskan waktunya seperti menjual barang, atau meminta-minta, mereka dibebani dengan target penghasilan harian, dan jika tidak tercapai, anak-anak ini bisa mendapat tekanan verbal maupun fisik. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang.

Eksplorasi ini tidak selalu terlihat secara langsung, namun sering tersembunyi di balik label "membantu keluarga" atau "belajar mandiri." Padahal, pada kenyataannya anak-anak tersebut kehilangan masa kecil mereka dan tidak memiliki akses yang layak terhadap pendidikan serta lingkungan yang aman dan mendukung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan masalah sosial yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Anak jalanan tidak seharusnya menjadi korban dari tekanan ekonomi dan sosial, tetapi harus dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan staf DP3A ibu Sri Putrida, menyatakan bahwa:

“Eksploritasi anak merupakan dampak nyata dari permasalahan sosial yang kompleks, khususnya yang dialami oleh anak-anak jalanan. Dua faktor utama yang mendorong terjadinya eksploritasi tersebut adalah masalah ekonomi dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pertama, faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan sehingga banyak keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan memilih untuk melibatkan anak-anak mereka dalam aktivitas mencari nafkah. Anak-anak ini dipaksa untuk mengamen, menjual tisu, atau bahkan mengemis di jalanan. Kedua, faktor kurangnya keharmonisan dalam keluarga sehingga konflik rumah tangga, perceraian, pengabaian, serta kekerasan dalam keluarga membuat anak-anak kehilangan tempat yang aman dan nyaman.”⁴²

Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa eksploritasi anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang paling memprihatinkan dalam kehidupan anak jalanan. Banyak anak yang dipaksa untuk turun ke jalan sejak usia dini untuk bekerja dan mencari uang. Bentuk eksploritasi ini muncul dalam berbagai cara, seperti menyuruh anak mengamen, menjual barang, atau meminta-minta, dan sering kali dilakukan atas tekanan dari orang tua, keluarga, atau bahkan pihak luar yang memanfaatkan kondisi anak-anak tersebut.

Wawancara juga menunjukkan bahwa eksploritasi anak ini sering kali tidak dianggap sebagai masalah oleh sebagian masyarakat. Aktivitas anak di jalan dianggap “wajar” atau “lumrah,” padahal pada kenyataannya mereka sedang berada dalam kondisi yang penuh tekanan dan pelanggaran hak anak. Banyak dari mereka juga mengaku merasa lelah, takut, dan tidak nyaman, namun tidak memiliki pilihan lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksploritasi anak jalanan merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang serius dan harus segera ditangani. Perlu ada sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan

⁴² Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial, *Wawancara* di Parepare tanggal 19 Mei 2025.

anak untuk mencegah praktik ini serta mengembalikan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan layak.

2. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Kota Parepare

Dinas Sosial Kota Parepare merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, diketahui bahwa Dinas Sosial telah menjalankan beberapa peran utama, antara lain: penjangkauan (identifikasi dan penjangkauan), asesmen awal, pendampingan sosial, serta koordinasi lintas sektor. Peran ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana diatur dalam kebijakan perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan.⁴³

Damsar dalam Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang memiliki arti atau makna (meaning) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain.²⁰ Jika tindakan tersebut tidak memiliki arti dan tidak diarahkan untuk orang lain maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebagai “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain.⁴⁴

Kata peran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pemain sandiwara sedangkan peranan seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang

⁴³Nurhalisa, “Peran Dinas Sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Parepare (Perspektif Siyash Syar’iyyah).”

⁴⁴Tatik Atiyatul Mufiroh, “Tradisi Nyadran Di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

menduduki status tertentu. Peranan peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.⁴⁵

Namun, implementasi peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ketiadaan rumah singgah atau balai rehabilitasi anak jalanan di tingkat kota. Akibatnya, anak-anak yang tidak dapat langsung dikembalikan ke keluarganya hanya ditampung sementara dan kemudian dirujuk ke lembaga sosial di luar kota. Proses ini menghambat kontinuitas pembinaan karena keterbatasan dalam pemantauan lanjutan.

Meski begitu, upaya koordinasi lintas sektor yang dilakukan Dinas Sosial menunjukkan arah kebijakan yang positif. Selain itu, keterlibatan komunitas seperti Rumah Belajar, relawan sosial, dan guru-guru pendamping juga menandakan adanya semangat kolaboratif dalam penanganan masalah ini.

Dengan demikian, meskipun Dinas Sosial Kota Parepare telah menjalankan perannya dalam penanganan anak jalanan, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor internal (fasilitas, SDM, anggaran) dan eksternal (komitmen antarinstansi, regulasi pendukung). Perlu adanya penguatan kelembagaan dan kebijakan yang lebih terstruktur agar penanganan anak jalanan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Penanganan anak jalanan merupakan bagian dari tugas rutin lembaga dalam upaya perlindungan dan penanggulangan masalah sosial. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa Dinas Sosial secara berkala melakukan kegiatan penjangkauan ke lokasi-lokasi strategis seperti perempatan jalan, pasar, dan kawasan publik yang sering menjadi tempat anak-anak mencari nafkah.”⁴⁶

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki peran dalam penanganan permasalahan sosial, termasuk anak jalanan, namun peran

⁴⁵ Andi Wahyudi, Djailan Usman, and Ansyari Mone, “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 4 (2021): 1287–99.

⁴⁶ Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial, *Wawancara* di Parepare tanggal 19 Mei 2025.

tersebut belum sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya dan dukungan kelembagaan yang memadai. Meskipun secara struktural lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penjangkauan, pendataan, dan pembinaan terhadap anak jalanan, pelaksanaan fungsi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sarana, personel, dan pendanaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dan kapasitas implementatif yang dimiliki lembaga.

Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penjangkauan terhadap anak jalanan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perlindungan dan pemulihan hak anak. Penjangkauan ini bertujuan untuk mendekati anak-anak yang hidup di jalan, membangun komunikasi yang baik, serta mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Pola komunikasi yang digunakan dalam penjangkauan yaitu dengan melakukan beberapa cara seperti patroli rutin, pengaduan, razia dan lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penjangkauan dilakukan secara langsung oleh petugas atau pekerja sosial di titik-titik strategis, seperti perempatan jalan, pasar, tempat wisata, atau area publik lainnya. Dalam proses ini, para petugas berupaya membangun kepercayaan dengan anak-anak jalanan, karena sebagian besar dari mereka cenderung tertutup, waspada, dan bahkan takut terhadap aparat atau orang asing.

Melalui penjangkauan, petugas dapat mengetahui latar belakang anak, seperti alasan mereka berada di jalan, kondisi keluarga, pendidikan terakhir, serta apakah mereka mengalami kekerasan atau eksploitasi. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menyusun rencana tindak lanjut, baik itu untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, maupun pengembalian ke keluarga.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa penjangkauan bukan hanya kegiatan teknis, tetapi merupakan pendekatan sosial yang menuntut kesabaran dan keterampilan interpersonal yang tinggi. Keberhasilan penjangkauan sangat menentukan efektivitas program penanganan anak jalanan ke depan, Sehingga dengan penjangkauan terkait permasalahan sosial anak jalanan dapat di selesaikan secara

baik. Oleh karena itu, penjangkauan harus dilakukan secara bertahap, persuasif, dan penuh empati, agar anak-anak merasa aman dan bersedia menerima bantuan.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdin,S.Sos., Staf Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Anak jalanan khususnya di Kota Parepare menjadi langkah penting dalam menangani permasalahan sosial yang mereka hadapi. pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, identitas, dan kondisi sosial anak-anak yang hidup di jalan, sehingga program penanganan dapat disusun secara tepat sasaran.”

Hal ini menunjukkan Proses pendataan biasanya dilakukan setelah kegiatan penjangkauan, di mana petugas atau pekerja sosial mendekati anak-anak secara langsung di lapangan seperti di lampu merah, pasar, dan kawasan publik lainnya. Anak-anak yang berhasil didekati kemudian didata melalui formulir khusus yang mencakup informasi seperti nama, usia, asal daerah, kondisi keluarga, pendidikan terakhir, serta alasan berada di jalan. Adapun data anak jalanan dari tahun 2020-2025 yaitu :

**DATA ANAK JALANAN KOTA PAREPARE
TAHUN 2020**

NO	DATA ANAK JALANAN	JUMLAH
1.	2020	10
2.	2021	28
3.	2022	25
4.	2023	16
5.	2024	17
TOTAL		96

Tabel 4.1 Sumber : Dari Dinas Sosial diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, bahwa hasil wawancara dengan bapak Rusdin, S.Sos., staf Dinas Sosial Kota Parepare bahwa total Anak Jalanan dari tahun 2020 s/d 2025 yaitu sebanyak 96 anak, di tahun 2020 total jumlah anak jalanan ialah 10 anak, di tahun 2021 jumlah anak jalanan naik sebanyak 28 anak, tahun 2022 total jumlah anak jalanan turun menjadi 25 anak, di tahun 2023 jumlah anak jalanan juga turun menjadi 16 anak, dan di tahun 2024 jumlah anak jalanan sebanyak 17 orang.

Pendataan anak jalanan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani masalah sosial, memiliki peran sentral dalam proses ini melalui pendataan yang sistematis dan menyeluruh, Dinas Sosial dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai anak jalanan. Kebutuhan anak jalanan seperti makanan bergizi, pakaian layak, dan tempat tinggal yang aman.

Terkait masalahnya yaitu karena faktor ekonomi (kemiskinan) ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kesehatan menjadi pendorong utama anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan, masalah keluarga, perceraian, percekcoakan, atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat membuat anak jalanan merasa tidak nyaman dan mencari pelarian di jalanan, lingkungan sosial anak-anak yang terpengaruh oleh teman-teman yang sudah menjadi anak jalanan beresiko mengikuti jejak mereka.

Mengenai intervensi yang dilakukan adalah pendataan dan pemantauan dengan melakukan survei lapangan, rescue dan rehabilitasi dengan menjangkau anak di jalanan untuk dibawa ke rumah singgah atau panti sosial, pendidikan dan pelatihan dengan menyediakan program pendidikan informal dan keterampilan kerja, serta kerja sama lintas sektor berkoordinasi dengan instansi lain.

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan pula bahwa pendataan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang intervensi seperti pemulangan

ke keluarga, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pendidikan alternatif, hingga perlindungan hukum jika anak mengalami kekerasan atau eksploitasi. Dengan data yang akurat, pemerintah dan lembaga sosial dapat bekerja lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembinaan anak jalanan terkait dengan pendataan seperti pemulangan ke keluarga atau asalnya dengan jumlah 15 anak, rehabilitasi dengan jumlah 5 anak, pemberian bantuan sosial dengan jumlah 10 anak, pendidikan alternatif dan perlindungan hukum dengan jumlah 2 anak. Bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu dengan pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, spritual dan keterampilan adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan daya anak jalanan sehingga mereka lebih percaya diri dalam pergaulan dengan masyarakat sosial lainnya. Dengan pendekatan Teori Actors bahwa pendekatan ini berfokus pada pembebasan individu dari kendali yang kaku, memberikan mereka kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses pendataan tidak selalu berjalan lancar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain anak yang berpindah-pindah lokasi, penggunaan identitas palsu, hingga kurangnya kesadaran anak terhadap pentingnya pendataan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang persuasif, sabar, dan penuh empati, agar anak-anak bersedia memberikan informasi dengan jujur dan merasa dilindungi.

Dengan proses pendataan dapat disimpulkan bahwa pendataan adalah fondasi utama dalam upaya penanganan anak jalanan. Tanpa data yang akurat dan menyeluruh, langkah-langkah perlindungan anak akan sulit dijalankan secara efektif. Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung proses ini.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdin,S.Sos., Staf Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Bantuan sosial memiliki peran penting dalam upaya penanganan anak jalanan sebagai bagian dari permasalahan sosial, bantuan sosial diberikan

sebagai bentuk intervensi awal untuk meringankan beban hidup anak-anak jalanan dan keluarganya, serta sebagai dorongan agar mereka dapat keluar dari kehidupan jalanan.”⁴⁷

Narasumber menjelaskan bahwa bentuk bantuan tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga pendampingan psikososial untuk mendukung pemulihan mental dan emosional anak-anak yang telah mengalami tekanan atau eksploitasi selama berada di jalan.

Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa penyaluran bantuan sosial tidak selalu berjalan efektif. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya data yang valid mengenai jumlah dan kondisi anak jalanan, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Selain itu, beberapa anak dan keluarganya masih enggan menerima bantuan karena kurangnya kepercayaan terhadap pihak luar atau karena sudah terbiasa hidup di jalan.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial merupakan komponen penting dalam penanganan permasalahan anak jalanan, namun pelaksanaannya harus disertai pendekatan yang tepat, pendataan yang akurat, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk menjamin keberhasilannya.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Mediasi keluarga merupakan salah satu pendekatan penting dalam menangani permasalahan sosial anak jalanan. Pihak Dinsos menyampaikan bahwa banyak anak berada di jalan bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena konflik dalam keluarga, kurangnya perhatian, bahkan kekerasan fisik maupun verbal yang mereka alami di rumah.”⁴⁸

Dalam penjelasan dari narasumber Dinsos, mediasi keluarga dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan hubungan antara anak dan orang tua atau wali, agar anak bisa kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung. Proses mediasi ini

⁴⁷ Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial, *Wawancara di Parepare tanggal 19 Mei 2025.*

⁴⁸ Rusdin, Sos., Staf Dinas Sosial, *Wawancara di Parepare tanggal 19 Mei 2025.*

biasanya dilakukan setelah proses penjangkauan dan pendataan, di mana anak-anak sudah mulai terbuka dan bersedia menceritakan kondisi keluarga mereka.

Dinsos menekankan bahwa dalam mediasi, petugas sosial berperan sebagai fasilitator netral yang berusaha menghadirkan komunikasi dua arah antara anak dan keluarganya. Tujuannya adalah membangun kembali kepercayaan, menciptakan pemahaman, serta merancang langkah konkret agar anak tidak kembali ke jalan. Dalam beberapa kasus, orang tua diberi pembinaan khusus mengenai pola pengasuhan, pentingnya pendidikan, dan pemenuhan hak anak.

Namun, menurut Dinsos, mediasi tersebut harus dilakukan dengan akurat. Karena terkait mediasi dengan keluarga bahwa anak jalanan ini harusnya mendapat perhatian yang baik oleh keluarga terkhususnya orang tua dari anak jalanan ini dimana karena salah satu faktor sosial seperti masalah ekonomi sehingga anak jalanan merasa tidak nyaman dan turun ke jalan. Oleh karena itu, Dinsos juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mendampingi keluarga setelah proses mediasi selesai.

Dapat disimpulkan bahwa mediasi keluarga menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan akar permasalahan anak jalanan, karena menyentuh langsung pada sumber utama perlindungan anak, yaitu keluarga itu sendiri. Dengan dukungan lintas sektor dan kesadaran dari keluarga, anak-anak jalanan diharapkan dapat kembali ke kehidupan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Salah satu langkah lanjutan dalam penanganan anak jalanan adalah merujuk mereka ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Rujukan ini dilakukan setelah proses penjangkauan, pendataan, dan asesmen terhadap kondisi anak. Dinsos menilai bahwa tidak semua anak dapat langsung dikembalikan ke keluarganya, terutama jika kondisi keluarga masih belum mendukung atau berisiko menimbulkan dampak buruk bagi anak.”⁴⁹

⁴⁹ Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial, *Wawancara* di Parepare tanggal 19 Mei 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa LKS berperan sebagai tempat perlindungan sementara yang menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti tempat tinggal yang aman, makanan, layanan kesehatan, pendidikan nonformal, serta pembinaan mental dan spiritual. Di lembaga tersebut, anak-anak dibimbing dan didampingi agar dapat memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka sebelum diarahkan ke langkah selanjutnya, seperti reunifikasi keluarga atau reintegrasi sosial.

Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa proses rujukan ini dilakukan secara selektif dan berdasarkan kesesuaian kebutuhan anak dengan layanan yang disediakan oleh masing-masing LKS. Dinsos bekerja sama dengan berbagai LKS yang telah memiliki izin dan kapasitas dalam menangani anak-anak dalam situasi rentan, termasuk anak jalanan, anak terlantar, dan korban kekerasan.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa rujukan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan langkah penting dalam penanganan komprehensif terhadap anak jalanan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki dukungan keluarga atau mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan dukungan yang tepat di LKS, anak-anak ini diharapkan dapat menjalani proses pemulihan dan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Hasil wawancara dengan bapak Zulkhaidir, S.Sos., staf Dp3A menyatakan bahwa:

“Anak jalanan sering kali ditemui seperti di jalan, perempatan, atau lampu merah, anak jalanan merupakan masalah sosial sehingga rujukan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menjadi salah satu upaya penting dalam menangani permasalahan anak jalanan yang tidak dapat langsung dikembalikan ke keluarganya. Langkah ini dilakukan setelah anak melalui proses penjangkauan, pendataan, serta asesmen yang menunjukkan bahwa

anak berada dalam situasi yang tidak aman atau tidak memiliki tempat tinggal yang layak.”⁵⁰

Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa LKS berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, hingga layanan konseling dan pembinaan. Rujukan ini sangat penting, terutama bagi anak-anak jalanan yang mengalami eksploitasi, kekerasan, atau berasal dari keluarga bermasalah secara sosial maupun ekonomi.

Sementara itu, pihak DP3A menambahkan bahwa rujukan ke LKS juga menjadi bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang haknya telah terabaikan. DP3A menekankan bahwa sebelum dirujuk, anak-anak terlebih dahulu diberikan pendampingan psikologis agar mereka siap secara mental untuk masuk ke dalam lingkungan baru. Selain itu, DP3A juga memastikan bahwa anak-anak tersebut ditempatkan di lembaga yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan bebas dari potensi kekerasan atau penelantaran lanjutan.

Kedua instansi ini mengakui bahwa meskipun rujukan ke LKS sangat membantu dalam proses pemulihan anak, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan daya tampung lembaga, kurangnya SDM profesional, dan minimnya dukungan lanjutan pasca-rujukan. Oleh karena itu, Dinsos dan DP3A terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memastikan sistem perlindungan anak jalanan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rujukan ke LKS merupakan bentuk intervensi yang konkret dan terstruktur dalam upaya menyelamatkan anak-anak jalanan dari risiko sosial yang lebih besar, sekaligus menjadi langkah awal untuk mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.

⁵⁰ Zulkhair, S.Sos., Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara di Parepare tanggal 19 Mei 2025.

B. PEMBAHASAN

1. Permasalahan Sosial Anak Jalanan di Kota Parepare

Anak jalanan merupakan bagian dari kelompok rentan yang menghadapi berbagai persoalan sosial secara kompleks dan berlapis. Di Kota Parepare, keberadaan anak-anak jalanan tidak hanya menjadi fenomena kasat mata di ruang-ruang publik seperti perempatan jalan, pasar, dan pusat kota, tetapi juga merupakan cerminan dari realitas sosial yang menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi, disfungsi keluarga, serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Permasalahan anak jalanan tidak dapat dipandang sebagai sekadar “anak yang bekerja di jalan”, melainkan sebagai gejala sosial yang melibatkan persoalan struktural dan kultural secara bersamaan.⁵¹

Anak jalanan khususnya di Kota Parepare, sering kali ditemui di jalanan atau di lampu merah perempatan sekitar kawasan monumen cinta sejati habibie ainun dan anak jalanan ini turun ke jalan karena permasalahan sosial seperti faktor masalah ekonomi (kemiskinan) ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan menjadi pendorong utama anak-anak mencari nafkah di jalanan. Sehingga anak jalanan ini mencari pelarian di jalanan.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi ”masalah” bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan negara. Kondisi keluarga yang kurang menyebabkan banyaknya anak-anak mereka tidak mendapat kehidupan yang layak. Mereka pun turun ke jalan entah itu hanya ikut-ikutan karena pengaruh teman atau untuk mencari

⁵¹ Solehudin, R. H. (2024). *Pengembangan instrumen penelitian: analisis kebijakan komunitas perkotaan dalam perspektif interseksional*. Kaizen Media Publishing.

rezeki di jalan hanya untuk memiliki uang sendiri. Kondisi keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak jalanan tersebut.⁵²

Salah satunya faktor penyebab munculnya Anak Jalanan adalah faktor yang berasal dari internal contohnya seperti kerusakan mental pada anak sendiri diakibatkan kesalahan pergaulan dan dipengaruhi oleh hal hal negatif pada teman sebaya. Kemudian ada Faktor External, yang dimaksud ialah faktor yang disebabkan dari pengaruh luar individu Anak Jalanan. Misalnya adalah permasalahan Ekonomi, Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin sehingga mereka yang harus membantu perekonomian keluarga dengan beraktifitas di jalanan. Beberapa aktifitas yang mereka lakukan antara lain seperti mengamen, mengemis, ataupun menjual barang seperti koran atau makanan. Selain itu, terlantarnya anak yang berasal dari keluarga broken home/perceraian yang menyebabkan orang tua yang tidak peduli dengan keadaan anak sehingga menjadi menggelandang di jalanan. Hubungan keluarga yang tidak harmonis turut menyebabkan anak terabaikan dan tidak diperdulikan.⁵³

Dengan demikian, pemberdayaan memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Konsep ini berfokus pada memberikan kekuatan, daya, dan kemampuan kepada kelompok yang lebih lemah agar dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun tanggung jawab utama pemberdayaan ada pada pemerintah, partisipasi berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Para ahli seperti Jim Ife, Paulo Freire, dan Michael Edward menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan peningkatan kekuatan, partisipasi, dan kemampuan

⁵² Rizcah Amelia, "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar," *Skripsi [Internet]. [Diunduh Pada 28 Maret 2016]. Tersedia Pada: Http://Repository. Unhas. Ac. Id/Bitstream/Handle/123456789/14610/SKRIPSI% 20RIZCAH% 20AMELIA. Pdf, 1â 111* (2015).

⁵³ Yanuar Ahmad Abdullah, "Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda," *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 9, no. 1 (2021): 78–91.

bertindak individu atau kelompok yang kurang bergantung. Dalam konteks tersebut pemberdayaan dapat dianggap sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi kehidupan mereka sendiri serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan individu guna mencapai kehidupan yang lebih baik.⁵⁴

Faktor utama yang terjadinya anak jalanan yaitu faktor ekonomi. Karena kurangnya ekonomi membuat anak turun ke jalanan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu faktor yang sering terjadi karena adanya faktor lingkungan yang menghasut untuk turun ke jalanan. Karena dari hasutan yang didapatkan anak jalanan tergiur untuk turun ke jalanan. Faktor utama pengemis yang turun ke jalanan merupakan minimnya sebuah pendidikan, dan tidak memiliki keterampilan kerja dan kurangnya anggota tubuh badan.

menurut Soedijar anak jalanan yang memiliki umur tujuh tahun sampai tujuh belas yang berada di jalanan sebagai mencari nafkah atau ditempat umum lainnya, yang bisa mengganggu keselamatan dan ketentraman orang lain dan membahayakan diri sendiri.⁵⁵

Menurut Ferry Johannes, Anak jalanan yang biasa dalam menghabiskan waktunya di jalanan, baik dalam mencari uang atau tidak merupakan anak-anak yang berhubungan dengan keluarga dan sudah biasa hidup mandiri sejak kecil dan merasakan kehilangan orang tua dan perhatian.⁵⁶ Anak-anak yang memiliki aktivitas ekonomii sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang erat dengan orang tua, sebagian dari nya diberikan kepada orang tua.⁵⁷

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan karena mereka berada dalam kondisi tidak bermasa depan yang jelas,

⁵⁴ Dyna Rodhiah Azizah and Budiman Budiman, "Optimalisasi Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 2 (2024): 42–48.

⁵⁵ A. Soedijar Z.A, *Profil Anak Jalanan*, Jakarta: Rineka Cipta 2010

⁵⁶ Ferry Johannes, "melonjak Jumlah Anak Jalanan", *Pikiran Rakyat* (Bandung), 10

⁵⁷ Bagong Suyanto, 2013 "Masalah Sosial Anak" (Jakarta: Kencana 2010).

dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, baik keluarga, masyarakat maupun Negara. Menjadi anak jalan bukanlah pilihan yang diinginkan setiap orang, melainkan keterpaksaan oleh kebutuhan hidup mereka seperti factor ekonomi yang masih kurang.⁵⁸

Permasalahan anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi keluarga sebagai lingkungan awal dan utama dalam pertumbuhan seorang anak. Salah satu faktor paling signifikan yang mendorong anak untuk turun ke jalan adalah disfungsi keluarga yaitu kondisi di mana keluarga gagal menjalankan fungsi dasarnya dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusdin, S.Sos. staf Dinas Sosial bahwa informasi terkait Disfungsi keluarga mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, orang tua yang bercerai atau pisah ranjang, pengabaian terhadap anak, hingga kondisi ekonomi keluarga yang sangat buruk. Dalam situasi seperti ini, anak-anak kehilangan rasa aman dan dukungan emosional, sehingga mereka merasa lebih nyaman berada di luar rumah, termasuk di jalanan.

Disfungsi keluarga merupakan akar dari banyak permasalahan anak jalanan. Ketika keluarga kehilangan kemampuannya dalam membina dan melindungi, maka anak-anak akan mencari tempat pelarian yang sering kali lebih berbahaya daripada di rumah. Oleh karena itu, terkait dengan masalah sesungguhnya bahwa adanya disfungsi keluarga sehingga anak merasa tidak nyaman dan mencari pelarian di jalanan. Upaya penanganan anak jalanan harus dimulai dari pemulihan fungsi keluarga, melalui mediasi, pendampingan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi orang tua. Tanpa pembenahan pada struktur keluarga, solusi jangka panjang bagi anak jalanan akan sulit tercapai. Negara dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan sistem perlindungan keluarga yang kuat agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

⁵⁸ Rita Vinolia Aruan and Roy Frendrick Halawa, "Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1173–78.

Anak jalanan muncul karena ketimpangan struktur penduduk di mana usia muda jumlahnya banyak, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka sangat minim sekali dan hadirnya anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya dan pendidikan. Sebagian besar anak jalanan termotivasi agar mendapat penghasilan sendiri dengan kata lain mereka berupaya untuk mencari nafkah tapi tidak sedikit pula anak jalanan yang sudah tidak bersekolah entah tamat atau putus sekolah yang kemudian mencari nafkah dengan menyatu di jalanan perkotaan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan suatu program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Namun permasalahan anak jalanan tidak pernah berakhir, seperti program-program penanganan anak jalanan yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi preventif maupun Rehabilitas akan tetapi permasalahan anak jalanan ini tidak pernah mampu terselesaikan secara tuntas.

Fenomena diatas mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial terhadap penanganan anak jalanan sangatlah besar. Permasalahan anak jalanan ini gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang harus diperoleh sebagai anak. Anak Jalanan yang justru harusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusia nya dan melakukan hal-hal yang menunjang pertumbuhan sebagai manusia.⁵⁹

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh negara dan menjadi salah satu kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, dalam realitasnya, anak jalanan sering kali terpinggirkan dari akses pendidikan yang layak. Kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak jalanan

⁵⁹ CHRISTIN Y DOMINIKA SINURAT, "ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)," 2023.

merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang berdampak panjang terhadap kehidupan dan masa depan mereka.

Kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang harus menjadi perhatian serius berbagai pihak. Tanpa pendidikan, anak jalanan akan terus hidup dalam ketidakberdayaan dan terpinggirkan dari pembangunan. Maka, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam sistem pendidikan, dengan menyediakan program sekolah alternatif, pendidikan keterampilan, dan pembinaan karakter, khusus bagi anak-anak yang hidup di jalan. Adapun data terkait dengan data pendidikan anak jalanan dari Dinas Sosial yaitu, terdapat 10 anak jalanan di tahun 2020 yang tidak bersekolah berasal dari Kota Parepare, diantara anak jalanan ini jumlah perempuan 4 orang dan laki-laki 6 orang.

Anak jalanan seringkali berhadapan dengan berbagai masalah, termasuk kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, perlu strategi dan implementasi kebijakan yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak anak jalanan benar-benar terlindungi dan mereka memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan.

Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan program pendidikan yang inklusif, pembentukan lingkungan sosial yang mendukung bagi anak jalanan, serta upaya untuk memperkuat jejaring sosial dan perlindungan bagi mereka.⁶⁰

Lingkungan sosial mencakup kondisi masyarakat di sekitar tempat tinggal anak, termasuk respons masyarakat terhadap keberadaan mereka, akses terhadap fasilitas umum, hingga nilai-nilai yang berkembang di dalam komunitas tersebut. Anak jalanan sering kali hidup dalam lingkungan yang meminggirkan, tidak peduli, bahkan penuh stigma. Mereka dianggap mengganggu ketertiban, kotor, dan tidak

⁶⁰ Ahmad Rosandi Sakir et al., “Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan,” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023): 19–26.

pantas berada di ruang publik, sehingga bukannya diberi perlindungan dan perhatian, mereka justru semakin dijauhkan dari ruang sosial yang seharusnya melindungi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang berpihak pada anak lingkungan yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga suportif secara sosial dan emosional. Dengan demikian, anak jalanan dapat kembali memiliki harapan untuk hidup lebih baik dan berkembang menjadi individu yang bermartabat.

Menurut Soekanto peran merupakan sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, dimana kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi maupun kelompok-kelompok. Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengatasi eksploitasi anak jalanan dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada anak jalanan yang ada di Kota Surabaya. Pembinaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan di anggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang menjadi fokus permasalahan adalah anak jalanan, maka perhatian diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan anak jalanan, misalnya keluarga anak jalanan tersebut dan masyarakat di mana anak jalanan menjadi bagian di dalamnya.

Eksplorasi anak adalah eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak- hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Eksploitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak sebagai pengemis jalanan yang mana diartikan sebagai orang-orang yang mendapatkan

penghasilan dengan cara meminta-minta didepan umum dengan bermacam cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁶¹

Teori struktural fungsional, masyarakat adalah sebuah sistem sosial mencakup berbagai macam bagian atau susunan yang saling berhubungan dan saling berkesinambungan dalam menciptakan keseimbangan. Perubahan yang terdapat pada satu bagian tentu akan menciptakan perubahan terhadap bagian yang lain. Sebaliknya jika struktur tidak fungsional, maka perubahan tidak akan pernah terbentuk dan hilang secara perlahan. Teori struktural fungsional cenderung untuk menilai satu sudut pandang melalui peranan satu sistem atau kegiatan terhadap sistem yang lain dan oleh sebab itu tidak melihat sudut pandang lain yang memungkinkan bahwa suatu aktivitas atau suatu sistem dapat berjalan dan bertolak belakang dengan fungsi yang lain dalam suatu sistem sosial. Teori fungsionalisme struktural menilai masyarakat sebagai suatu individu yang stabil dengan lebih dominan menuju ke arah keseimbangan.⁶² Dengan menggunakan pendekatan teori struktural fungsional ini akan memberikan perubahan satu bagian tentu dan menciptakan perubahan terhadap bagian yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan teori struktural-fungsional terkait eksploitasi anak sangat efektif dalam permasalahan sosial anak jalanan, dimana teori struktural fungsional cenderung untuk menilai satu sudut pandang melalui peranan satu sistem atau kegiatan terhadap sistem yang lain dan oleh sebab itu tidak melihat sudut pandang lain yang memungkinkan bahwa suatu aktivitas atau sistem dapat berjalan dan bertolak belakang dengan fungsi yang lain dalam suatu sistem sosial. Sehingga dengan adanya teori struktural fungsional menilai masyarakat sebagai suatu individu yang stabil dengan lebih dominan menuju ke arah keseimbangan dan saling berhubung.

⁶¹ Auliya Putriadi Hasibuan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2023).

⁶² Rafli Hidayat, “Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden,” *Tidak Dipublikasi, Skripsi. Fakultas Dakwah, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*, 2024.

Eksplotasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Eksplotasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan keuntungan sendiri. Atau pemerasaan tenaga orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Eksplotasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan psikisnya. Eksplotasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).⁶³

Faktor utama penyebab kasus eksploitasi terhadap anak terjadi karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari mengamen dan mengemis lebih mengiurkan dari pada bekerja ditempat makan sehari semalam. Kebohongan pun diajarkan kepada anak mengemis dengan mengatasnamakan fakir miskin, anak yatim, pesantren, dan lain-lain.⁶⁴

Anak jalanan adalah kelompok anak yang hidup dan bekerja di jalan untuk bertahan hidup, sering kali tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga maupun negara. Dalam realitasnya, mereka tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi dan pendidikan, tetapi juga menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Eksploitasi terhadap anak jalanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak, dan termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial yang mendesak untuk ditangani.

⁶³ Ahmad Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus Di Taman Kota Metro)" (IAIN Metro, 2020).

⁶⁴ Aninda Puri and Diana Hertati, "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Surabaya," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2024): 1–11.

Eksplotasi yang dialami anak jalanan bisa bermacam-macam, mulai dari eksploitasi ekonomi seperti dipaksa mengamen, mengemis, berjualan di bawah tekanan, hingga eksploitasi fisik dan seksual. Tidak sedikit anak yang menjadi korban sindikat pemanfaatan anak untuk mencari uang, bahkan ada yang dikontrol oleh oknum dewasa yang menjadikan mereka sebagai sumber penghasilan.

Dengan memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat, anak-anak jalanan bisa kembali merasakan masa kecilnya dan memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai individu yang bermartabat dan berdaya terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

2. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan

Dinas sosial merupakan salah satu institusi yang digunakan oleh individu untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya sosial adalah rumah makan sosial istilah ‘dinas sosial’ merujuk pada tugas yang berfungsi sebagai pengganti bupati dalam proses membangun lembaga publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat di bidang sosial fungsionalitas sosial termasuk, namun tidak terbatas pada proses rehabilitasi dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.⁶⁵

Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay memandang masyarakat sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan. Pendekatan ini berfokus pada pembebasan individu dari kendali yang kaku, memberikan mereka kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian sosial dan etika/moral.⁶⁶

⁶⁵ Dinas Sosial “Pengertian, tugas, fungsi dari dinas sosial” dinsos.tanjabbarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

⁶⁶ Maani, “Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat.”

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang sangat diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial. Pelaksanaan tugas, bakti sosial didukung oleh pekerja sosial.⁶⁷

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan melalui teori ACTORS. Pertama, pembangunan harus diarahkan pada perubahan struktural. Hal ini penting karena mengubah struktur dasar sistem akan membantu mencapai tujuan pembangunan secara efektif.

Kedua, pembangunan bertujuan untuk memerdayakan masyarakat agar bisa memecahkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Langkah ini melibatkan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Ketiga, pembangunan harus diarahkan pada koordinasi yang baik. Upaya penguatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa perspektif: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; kedua, meningkatkan kapasitas pembangunan masyarakat melalui berbagai dukungan finansial, pelatihan, infrastruktur, sarana fisik dan sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga, melindungi yang rentan dan memihak mereka untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan anak jalanan, bukan hanya dalam aspek penyelamatan jangka pendek, tetapi juga dalam rehabilitasi jangka panjang, pemulihan keluarga, dan pemberdayaan sosial. Keberhasilan program Dinsos sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat, keberpihakan kebijakan pemerintah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. Dinas Sosial mencakup beberapa aspek penting, yaitu penjangkauan, pendataan,

⁶⁷ Dinas sosial “tugas pokok dan fungsi dinas sosial” dinsos.tanjabbarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

pemberian bantuan sosial, mediasi dengan keluarga, hingga rujukan lembaga kesejahteraan sosial.⁶⁸

Peran adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dimana kedudukan tersebut dalam taraf baik yang tinggi, rendah atau sedang-sedang saja. Kedudukan itu sendiri merupakan wadah yang didalamnya berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut disebut dengan kata peran. Sehingga seseorang memiliki kedudukan tertentu disebut dengan pemegang peran (*role occupant*). Sebenarnya suatu hak adalah wewenang dalam melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban itu sendiri adalah tugas atau beban.⁶⁹

Menurut Kontjaraningrat berpendapat bahwa peranan berkaitan dengan status sosial sebagai suatu jenis tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Peran adalah tempat khusus yang ditugaskan kepada seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁰

Robert Linton seorang antropolog telah mengembangkan teori peran, Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita yang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.⁷¹

Secara Sosiologis, peran adalah dinamika suatu kedudukan atau penggunaan hak dan kewajiban.⁷² Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, kita berbicara tentang peran. Peran memiliki aspek sebagai berikut:

- a) Peran bersifat impersonal, kedudukan peran menentukan harapan-harapan yang diwujudkan individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

⁶⁸ Rahmatina, A.R. (2020). "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Dan."

⁶⁹ R suty Bakir and Sigit Suryanto, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009), h.348.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar," (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.221.

⁷¹ Wahyudi, A., Usman, D., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1287-1299.

⁷² Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Grasindo, 2005).

- b) Peran mengacu pada perilaku kerja, perilaku yang diinginkan tempat kerja.
- c) Peran dan pekerjaan itu tidak sama.⁷³

Permasalahan anak jalanan merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensi. Mereka kerap menghadapi risiko eksploitasi, kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Dalam konteks ini, Dinas Sosial sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam upaya penanganan anak jalanan, baik melalui langkah preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Menurut teori peran, peran adalah sebagai tindakan sikap yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan-peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh individu.⁷⁴

Dinas Sosial berperan dalam mencegah meningkatnya jumlah anak jalanan melalui program-program edukatif dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga-keluarga yang tergolong rentan secara sosial dan ekonomi. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anak, penguatan ketahanan keluarga, serta kampanye anti-eksploitasi anak menjadi bagian dari upaya preventif ini. Selain itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan sekolah, lembaga keagamaan, dan LSM untuk menanamkan nilai-nilai perlindungan anak sejak dini.

Dinas Sosial atau Lembaga Sosial adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat stuktural atau pekerja-pekerja sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut ramadhani, Sarbaini, dan Matnuh Dinas Sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan

⁷³ Fakhmi Umar, "Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) atau Terlantar di Kota Bandar Lampung," *Fakultas Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung*, 2017.

⁷⁴ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Press. Jakarta. 2010)

pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.⁷⁵

Dinas Sosial memiliki program dalam penanganan anak jalanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan. Program-program ini meliputi pencegahan, penjangkauan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Menurut informasi oleh pak Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial dalam wawancara mengatakan bahwa, dalam menangani anak jalanan Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi dan Dinas Sosial memiliki program diantaranya ialah dengan membawa anak jalanan ke lembaga sigurutta kabupaten maros guna untuk mengarahkan mereka atau memberikan pembinaan terkait anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak rusdin bahwa, anak jalanan yang dibawa ke maros itu diberikan penanganan Sebagai bentuk kelanjutan dari proses rehabilitasi, Dinas Sosial Parepare merujuk anak tersebut ke Lembaga Sigurutta Makkareso Maros yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan berlokasi di Kabupaten Maros. Lembaga ini berperan sebagai tempat rehabilitasi sosial dan pengembangan diri bagi anak-anak yang sebelumnya hidup di jalanan. Anak jalanan yang dibawah ke lembaga sigurutta ada beberapa dari mereka sudah bekerja sebagai mekanik di kalimantan berkat hasil pembinaan dan penanganan ke lembaga tersebut.⁷⁶

Peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam menangani anak jalanan mencakup beberapa aspek penting, yaitu penjangkauan, pendataan, bantuan sosial, mediasi dengan keluarga, hingga rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial. Dinas Sosial melalui tim petugas lapangan atau pekerja sosial secara aktif menyusuri titik-titik yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya anak jalanan, seperti pasar, terminal, perempatan lampu merah, atau tempat-tempat umum lainnya. Dalam kegiatan ini,

⁷⁵ Hargo Dwi Wijayanto, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019).

⁷⁶ Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial, *Wawancara* di Parepare tanggal 19 Mei 2025.

petugas tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga membangun komunikasi dan pendekatan secara persuasif kepada anak-anak tersebut.

Penjangkauan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan empatik, mengingat anak jalanan seringkali mengalami trauma, kecurigaan terhadap aparat, atau penolakan terhadap sistem formal. Oleh karena itu, dalam proses ini, petugas Dinas Sosial dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kesabaran, dan pemahaman terhadap latar belakang psikososial anak.

Penjangkauan yang dimaksud sesuai pasal 1 ayat (1) : “penjangkauan adalah penjemputan atau penyelamatan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang terlantar yang beraktifitas di jalan dan di tempat-tempat umum tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban untuk dibina dan berdayakan”.⁷⁷

Penjangkauan juga menjadi momentum penting untuk menggali akar permasalahan yang menyebabkan anak-anak ini turun ke jalan, seperti faktor ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran, atau bahkan eksploitasi. Dengan demikian, langkah-langkah intervensi selanjutnya bisa dirancang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui kegiatan penjangkauan ini, Dinas Sosial tidak hanya menyelamatkan anak-anak dari kehidupan jalanan, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, dengan harapan anak-anak tersebut dapat dipulihkan secara sosial dan kembali ke lingkungan yang aman, layak, dan mendukung perkembangan mereka.

Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan kepada anak jalanan. Adapaun format pendataannya yaitu seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur dan dimana anak jalanan tersebut tertangkap. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai aspek pendataan yang dilakukan Dinas Sosial sudah sangat tepat dengan melakukan razia kemudian mendatanya. Tetapi disisi lain Dinas Sosial atau pihak

⁷⁷ GILANG RAMADHAN, “KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN ANAK,” n.d.

terkait lainnya tidak melakukan hal tersebut jika tidak ada keluhan dari masyarakat atau pengguna jalan yang terganggu dengan keberadaan anak jalanan.⁷⁸

Pendataan merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting dalam proses penanganan anak jalanan. Dinas Sosial memegang peranan kunci dalam melakukan pendataan secara sistematis dan menyeluruh sebagai dasar untuk menyusun strategi intervensi yang tepat dan berkelanjutan.

Pendataan ini dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak dan bersifat partisipatif agar anak merasa aman dan mau memberikan informasi secara jujur. Dalam beberapa kasus, anak jalanan menunjukkan ketakutan atau penolakan karena pengalaman buruk sebelumnya, sehingga petugas sosial harus menggunakan pendekatan yang sabar dan komunikatif.

Data yang terkumpul kemudian direkap dan dianalisis untuk menentukan langkah lanjutan seperti pemberian bantuan, pembinaan, rehabilitasi, atau rujukan ke lembaga terkait. Pendataan juga menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan daerah, program perlindungan anak, serta alokasi anggaran sosial oleh pemerintah. Adapun data Anak jalanan yang di ambil oleh Dinas Sosial dari tahun 2020 s/d 2025 ialah:

REKAP JUMLAH ANAK JALANAN TAHUN 2020-2025

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2020	6	4	10
2021	19	9	28
2022	18	7	25
2023	12	4	16
2024	10	7	17
TOTAL	65	31	96

⁷⁸ Reza Hariawan, Maskan Maskan, and Wesley Liano Hutasoit, “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda,” *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan* 20, no. 3 (2021): 323–35.

Sumber: Dari Dinas Sosial diolah oleh penulis.

Berdasarkan data diatas, bahwa dengan pendataan yang akurat, Dinas Sosial dapat mengetahui profil dan kebutuhan riil anak-anak jalanan, serta mengukur efektivitas dari program-program penanganan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, pendataan bukan hanya aktivitas administratif, tetapi merupakan pondasi utama dalam merancang kebijakan perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan secara holistik dan berkelanjutan. Terkait dengan data di atas selain dari total anak jalanan yang naik dan turun tiap tahunnya dengan jumlah anak jalanan tersebut.

Dalam upaya menangani permasalahan anak jalanan, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi nyata yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek pendampingan psikososial dan pemulihan kehidupan anak agar dapat kembali menjalani masa depan yang lebih baik. Terkait informasi dari Dinas Sosial bahwa Melalui kerja sama dengan balai latihan kerja atau lembaga rehabilitasi seperti Lembaga Sigurutta Makkareso Maros, Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, otomotif, servis elektronik, tata boga, dan lainnya. Bantuan ini bertujuan agar anak-anak jalanan memiliki bekal hidup dan kemandirian ekonomi setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Dalam upaya penanganan anak jalanan Melalui berbagai bentuk bantuan sosial ini, Dinas Sosial tidak hanya hadir sebagai penyedia bantuan fisik, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong transformasi sosial. Pendekatan yang dilakukan bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan harapan agar anak-anak yang pernah hidup di jalan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, serta menjadi pribadi yang mandiri dan produktif.

Siklus masa anak-anak merupakan fase tumbuh kembang anak dalam menentukan masa depannya. Maka dari itu perkembangan anak sangat membutuhkan peran dari orang tuanya seperti perhatian dan kasih sayang dari keluarganya sehingga kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Hingga saat ini Indonesia

masih dihadapkan dengan berbagai masalah pada anak. Fenomena yang perlu menjadi perhatian saat ini yaitu maraknya anak-anak jalanan. Menurut Kementerian Sosial RI (2001:20), anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Dengan demikian, anak yang di bawah umur termasuk dalam tanggung jawab negara.

Faktor yang mempengaruhi anak jalanan biasanya terbentuk dari keadaan mereka sendiri, terutama keadaan finansial anak tersebut dan keluarganya dan anak jalanan biasanya berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, kurangnya mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal, dan lainnya. Bahkan banyak dari masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap arti pentingnya anak, komitmen dan tanggung jawab orang tua yang masih terbilang rendah. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab keterlantaran pada anak. Permasalahan pada anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang saling mempengaruhi jika kebutuhan dan hak yang tidak terpenuhi.⁷⁹

Dengan demikian, Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan melalui mediasi dengan keluarga dalam upaya agar adanya mediasi yang baik, anak-anak tidak hanya mendapatkan kembali tempat tinggal, tetapi juga dukungan emosional dan sosial dari keluarga, yang sangat penting untuk proses pemulihan dan tumbuh kembang mereka. Mediasi keluarga menjadi salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan program reintegrasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial.

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan Tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial,

⁷⁹ Rachman, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya."

rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.⁸⁰

Dalam proses penanganan anak jalanan, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). LKS adalah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan secara resmi bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, termasuk rehabilitasi anak jalanan.

Rujukan ke LKS dilakukan ketika anak jalanan yang telah terjaring atau terdata memerlukan layanan lebih lanjut di luar kemampuan jangka pendek yang disediakan oleh Dinas Sosial, seperti rumah singgah sementara. LKS memiliki sarana dan program yang lebih terfokus, terutama dalam aspek pembinaan karakter, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan psikososial secara intensif.

Rujukan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi sosial jangka menengah hingga jangka panjang yang bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan hidup (life skill) serta kesiapan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri dan berdaya.

Dinas Sosial tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak-anak yang dirujuk ke LKS, guna memastikan bahwa proses pembinaan berjalan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Bahkan dalam beberapa kasus, Dinas Sosial juga memfasilitasi penempatan kerja setelah anak menyelesaikan masa pembinaan di LKS, baik di dalam maupun luar daerah.

Melalui mekanisme rujukan ini, Dinas Sosial menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta menjamin

⁸⁰ SINURAT, "ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)."

bahwa anak jalanan tidak hanya ditangani secara sementara, melainkan dibimbing hingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut terkait peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Parepare:

1. Permasalahan sosial anak jalanan merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, disfungsi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya akses pendidikan, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Anak-anak yang hidup di jalanan mengalami berbagai bentuk kerentanan, mulai dari eksploitasi ekonomi hingga ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikologis mereka. Keberadaan mereka juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan sekitarnya.
2. Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan sangat penting dan strategis, mencakup berbagai upaya mulai dari penjangkauan langsung di lapangan, pendataan, pemberian bantuan sosial, mediasi dengan keluarga, hingga rujukan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak jalanan serta membuka jalan menuju kemandirian. Dengan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan, Dinas Sosial telah berkontribusi dalam menyelamatkan masa depan anak-anak dari kehidupan jalanan menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dinas Sosial, disarankan agar terus meningkatkan kualitas dan cakupan layanan sosial bagi anak jalanan, termasuk penyediaan rumah singgah yang memadai, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta penguatan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif.
2. Kepada masyarakat, diharapkan untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, ramah anak, dan mendorong anak-anak agar tetap dalam pengasuhan keluarga serta memperoleh hak-hak dasarnya, khususnya pendidikan dan perlindungan.
3. Kepada keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, penting untuk meningkatkan perhatian terhadap kondisi psikologis dan kebutuhan anak-anak agar mereka tidak terjerumus ke kehidupan jalanan. Komunikasi yang baik, pendidikan karakter, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak harus menjadi prioritas.
4. Kepada lembaga pendidikan dan organisasi sosial, agar dapat bersinergi dengan Dinas Sosial dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta program pemberdayaan bagi anak-anak jalanan dan keluarganya, sehingga mereka dapat kembali menjadi bagian aktif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yanuar Ahmad. "Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 9, no. 1 (2021): 78–91.
- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 2 (2017): 171–84.
- Aini, Andi Nur. "Partisipasi PC Fatayat NU (Nahdatul Ulama) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2024.
- Amelia, Rizcah. "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar." *Skripsi [Internet]. [Diunduh Pada 28 Maret 2016]. Tersedia Pada: [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/14610/SKRIPSI% 20RIZCAH% 20AMELIA. Pdf](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA.Pdf), 1â 111 (2015).*
- Andhini¹, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019).
- Andi, Aysha Zalika Ardita Putri. "Permasalahan Anak Jalanan Di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan Di Surabaya)." *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 1, no. 1 (2022): 28–37.
- Anggriana, A Jurana. "Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Belajar Cinta Damai Di Kecamatan Ujung Kota Parepare." IAIN Parepare, 2023.
- ANGREINY, SITI CHELSEA. "Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2022.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta, 2013.
- Ariadin, Silmi Qurota Ayun. "Peran Komunitas Siguru Dalam Membentuk Karakter Reigius Sosial Anak Jalanan Kota Parepare." IAIN Parepare, 2023.
- Aruan, Rita Vinolia, and Roy Frendrick Halawa. "Peranan Dinas Sosial Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1173–78.
- Azizah, Dyna Rodhiah, and Budiman Budiman. "Optimalisasi Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 2 (2024): 42–48.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016.

- Darmawansyah, Rizwan. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 138–49.
- Fadeli, Muhammad, and Lailatul Musyarofah. "Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 6, no. 1 (2022): 24–38.
- HADIJAH, HADIJAH. "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak." IAIN Parepare, 2024.
- Hadjerah, Sitti. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare." IAIN Parepare, 2022.
- Hariawan, Reza, Maskan Maskan, and Wesley Liano Hutasoit. "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda." *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan* 20, no. 3 (2021): 323–35.
- Hasibuan, Auliya Putriadi. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, 2023.
- Hidayat, Rafli. "Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden." *Tidak Dipublikasi, Skripsi. Fakultas Dakwah, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*, 2024.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jubaedah, Imas Siti, Dadang Kuswana, and Putri Diesy Fitriani. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 4 (2022).
- Juwita, Rahmi, Firman Firman, Rusdinal Rusdinal, and Muhammad Aliman. "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan." *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (2020): 1–8.
- Kurniawan, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro (Studi Kasus Di Taman Kota Metro)." IAIN Metro, 2020.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)*, 2019.
- Maani, Karjuni Dt. "Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Demokrasi* 10, no. 1 (2011).

- Machendrawaty, Nanih, and Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*. PT Remaja Rosdakarya Offset–bandung, 2001.
- Meitriana, S Pd Made Ary, Anjuman Zukhri, and Maulida Oktaviana. “Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur) Tahun 2012.” *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (2014): 5242.
- Mufiroh, Tatik Atiyatul. “Tradisi Nyadran Di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Muslim, Aziz. “Metedologi Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Teras Kompleks Ri Gowok.” Hal, 2009.
- Nasira, St. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU (Studi Kasus Di Yayasan LP2EM Kota Parepare).” STAIN Parepare, 2017.
- Nurhalisa, Nurhalisa. “Peran Dinas Sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar’iyyah).” IAIN PAREPARE, 2023.
- Puri, Aninda, and Diana Hertati. “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Surabaya.” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2024): 1–11.
- Putra, Fikriyandi, Dessy Hasanah, and Eva Nuriyah. “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah.” *Share Social Work Journal* 5, no. 1 (2015): 181610.
- Rachman, Dian Tannia. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya.” In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2:662–72, 2023.
- Rahmatina, ANGELIA RINDU. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Dan,” 2020.
- RAMADHAN, GILANG. “KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN ANAK,” n.d.
- Ramadhani, M, and Sarbaini Harpani Matnuh. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).
- Roby, Amriyan. “PERAN RUMAH RAMAH ANAK BUSSAINA DALAM MEMBERIKAN PENGUATAN KEAGAMAAN DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Said, Irwanti. “Analisis Problem Sosial Makassar.” Alauddin University Press, 2012.
- Sakir, Ahmad Rosandi, Yusriah Amaliah, Juwita Pratiwi Lukman, and Marlina Rajab. “Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan.” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023): 19–26.
- Saleh, Arifin, and Mislan Sihite. “Strategi Komunikasi Untuk Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 98–105.
- Shadiqin, Nurhadi. “Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Jalan Sultan Alauddin Makassar.” Skripsi, 2018.
- SINURAT, CHRISTIN Y DOMINIKA. “ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN),” 2023.
- Wahyudi, Andi, Djailan Usman, and Ansyari Mone. “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 4 (2021): 1287–99.
- Wijayanto, Hargo Dwi. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.
- Yunus, Saifuddin, Fadli Suadi, and M Si Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing, 2017.
- Zubaedi. “Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik.” *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik (1st Ed.)*, n.d.

The logo is a large, stylized emblem. It features a central shield-like shape with a green arch at the top. Inside the arch is a blue and white circular motif. Below this is a yellow star-like shape. The shield is flanked by two green vertical bars. The entire shield is enclosed within a purple border that has a decorative, pointed bottom. The word "PAREPARE" is written in a bold, sans-serif font at the bottom of the shield.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Copy_2skripsi_ahmad_ghasi1_1-1752126157074

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**repository.iainpare.ac.id**

Internet Source

7%**2****repository.radenfatah.ac.id**

Internet Source

2%**3****repository.uhn.ac.id**

Internet Source

2%**4****www.ejournal.um-sorong.ac.id**

Internet Source

1%**5****ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id**

Internet Source

1%**6****digilibadmin.unismuh.ac.id**

Internet Source

1%**7****ejournal.universitastabanan.ac.id**

Internet Source

<1%**8**

Reza Hariawan, Maskan Maskan, Wesley Liano Hutasoit. "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda", PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 2021

Publication

<1%**9****repository.unhas.ac.id**

Internet Source

<1%**10****ejournal.lpipb.com**

Internet Source

<1%**11****Submitted to Sultan Agung Islamic University**

Student Paper

<1%



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-3117/in.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 29 Agustus 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 3117 Tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Mahyuddin, S.Sos., M.A.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : AHMAD GHASI SAHARUDDIN
NIM : 2020203870231008
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Penelitian : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PAREPARE
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-922/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2025

28 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AHMAD GHASI SAHARUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 17 Oktober 2002
NIM : 2020203870231008
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL JEND SUDIRMAN KEC. BACUKIKI BARAT KEL. BUMI HARAPAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000401

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 401/IP/DPM-PTSP/5/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **AHMAD GHASI SAHARUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

ALAMAT

: **JL. JEND. SUDIRMAN NO. 206 A, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE
 2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE
 3. KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (ANAK JALANAN DI KAWASAN MONUMEN CINTA SEJATI HABIBIE AINUN)**

LAMA PENELITIAN : **09 Mei 2025 s.d 09 Juni 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **14 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : AHMAD GHASI SAHARUDDIN
 NIM : 2020203870231008
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
 JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK
 JALANAN DI KOTA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

PERTANYAAN:

Untuk Dinas Sosial Kota Parepare

1. Apa saja program yang telah di jalankan oleh Dinas Sosial untuk Anak Jalanan?
2. Bagaimana bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan lembaga lain dalam penanganan Anak Jalanan?
3. Apa saja tantangan yang di hadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan program penanganan Anak Jalanan?
4. Apakah terdapat program pendidikan dan pelathan untuk Anak Jalanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial?
5. Bagaimana hasil atau evaluasi dari program-program tersebut?

Untuk Masyarakat dan Pengendara Kota Parepare

1. Apa pendapat Anda tentang keberadaan anak jalanan di kota ini?
2. Apakah Anda merasa terganggu dengan keberadaan anak jalanan?

3. Apakah Anda pernah memberikan bantuan kepada anak jalanan? Jika ya, bantuan seperti apa?
4. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah anak jalanan?
5. Apakah Anda percaya bahwa anak jalanan bisa memiliki masa depan yang lebih baik?
6. Apa saran Anda agar anak-anak tersebut bisa keluar dari kehidupan jalanan?

Parepare, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Mahyuddin, S.Sos., M.A.

199110312019031003

PAREPARE

DATA ANAK JALANAN 2020-2025

NO	DATA ANAK JALANAN	JUMLAH
1.	2020	10
2.	2021	28
3.	2022	25
4.	2023	16
5.	2024	17
	TOTAL	96



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL
Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon (0421) 27266
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor : 450/462/Dinsos

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Hj HERIYATI, S.E
Jabatan : Sekretaris

Menyatakan bahwa :

N a m a : AHMAD GHASI SAHARUDDIN
N I M : 2020203870231008
Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab dan Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)
Judul Penelitian : “ Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare “.

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 09 Mei s/d 09 Juni 2025 pada Dinas Sosial Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Juni 2025

An. Kepala Dinas
Sekretaris,



Hj. HERIYATI, S.E

Pembina, IV/a

Nip. 19681024 199003 2 004



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Chalik II No. 8C Parepare, Telp. (0421) 21296, Faks (0421) 3312003
Kode Pos 91123, E-mail : dinasp3a@gmail.com, Website: <https://dpppa.pareparekota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 179 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMADI M, SE., MM
NIP : 19660510 199303 1 012
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD GHASI SAHARUDDIN
NIM : 2020203870231008
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah Melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai tanggal 09 Mei 2025 s.d 09 Juni 2025 dengan judul penelitian "**Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada Tanggal 10 Juni 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare



JUMADI M, SE., MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19660510 199303 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdin . S.Sos
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap . 20 Juni 1983
Jenis Kelamin : laki - laki
Agama : islam
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,

2025

Yang bersangkutan

(Rusdin . S.Sos)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkhaedir, S. Sos
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 04 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 19 Mei 2025

Yang bersangkutan



(Zulkhaedir, S. Sos)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI PUTRIDA, S.Sos. MM

Tempat, Tanggal Lahir : JENEPONTO, 15 JULI 1977

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Ghasi Saharuddin

NIM : 2020203870231008

Alamat : Jl.jendral sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat

Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 2025

Yang bersangkutan



(SRI PUTRIDA, S.SOS, MM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR RAHMA, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : MORAWALI, 12 JULI 1982

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Ghasi Saharuddin

NIM : 2020203870231008

Alamat : Jl.jendral sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat

Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare,

2025

Yang bersangkutan



NUR RAHMA, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sainal baktiar
 Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 02/01/1986
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : WIKASWASTA /ojek

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin
 NIM : 2020203870231008
 Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
 Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 2025
 Yang bersangkutan

(Sainal baktiar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALWALY UMAR
Tempat, Tanggal Lahir : Lantutuka, 26 - 01 - 1980
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA / OGBK

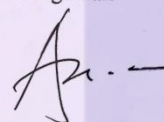
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 - 06 - 2025

Yang bersangkutan



(ALWALY UMAR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 18 November 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin

NIM : 2020203870231008

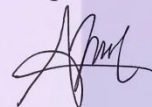
Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat

Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 Juni 2025

Yang bersangkutan



(Muh. Aidil Ramadhan, S.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Nur Syafi'i
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 14 Agustus - 2009
Jenis Kelamin : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Masyarakat

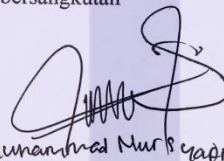
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 16 /06 2025

Yang bersangkutan



(Muhamad Nur Syafi'i)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

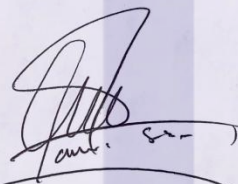
Nama : AHMIL DZUL IKRAM, S. Sos
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 12 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.Jendral Sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam penanganan anak jalanan di kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 16 / 06 2025
Yang bersangkutan

(
Ahmad Ghasi Saharuddin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhlis
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 18 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang ojek

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.jendral sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 9 Juli 2025
Yang bersangkutan

(Muhlis)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nirma
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 4 Mei 2015
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Ahmad Ghasi Saharuddin
NIM : 2020203870231008
Alamat : Jl.jendral sudirman,Kel bumi harapan,Kec bacukiki barat
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Parepare

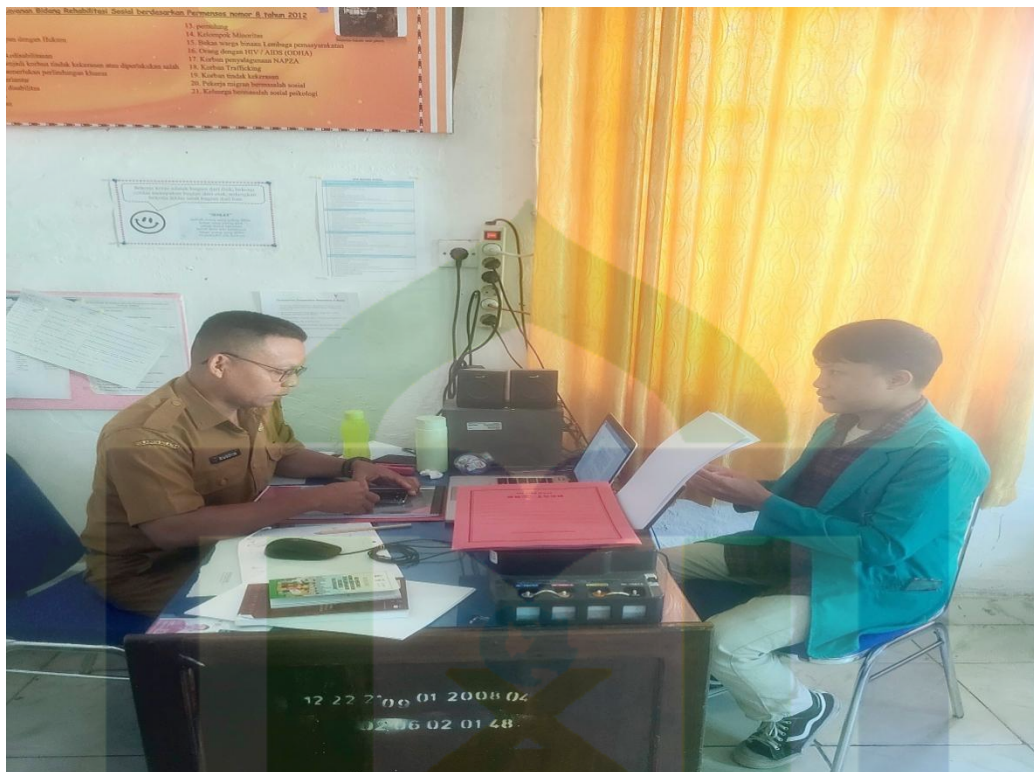
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 2025
Yang bersangkutan

( Nirma)

PAREPARE

1. Wawancara dengan Rusdin, S.Sos., Staf Dinas Sosial Kota Parepare



2. Wawancara dengan Zulkhaidir, S.Sos., Staf Dp3A Kota Parepare



3. Wawancara dengan Sri Putrida, S.Sos., Staf Dp3A Kota Parepare



4. Wawancara dengan Nur Rahma, S.H, M.H., Staf Dp3A Kota Parepare



5. Wawancara dengan Zainal baktiar, Tukang Ojek



6. Wawancara dengan Alwan Umar, Tukang Ojek



7. Wawancara dengan Muhammad Aidil, S.H., Pengendara



8. Wawancara dengan Muhammad Nur Syafi'i, Pengendara



9. Wawancara dengan Aidil Dzul Ikrom, S.Sos., Warga



10. Wawancara dengan Muhlis, Masyarakat



11. Wawancara dengan Nirma, anak jalanan



BIODATA PENULIS



Ahmad Ghasi Saharuddin, Lahir pada tanggal 17 Oktober 2002 di Kota Parepare dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ibu Hasnawati dan Bapak Saharuddin Samad, S.pd.i.,. Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 56 Parepare Lulus pada tahun 2014, MTs DDI Al-Furqon Parepare lulus pada tahun 2017, dan SMK DDI Parepare lulus pada tahun 2020, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Adapun pengalaman penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2021-2022 sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat.

Penulis pada tahun ketiga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 di Desa Rossoan, Dusun Dadeko, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama (kemenag) Kabupaten Pangkep.

Mata kuliah yang sangat disukai penulis yaitu Fiqh Ibadah, Kewirausahaan, dan Studi Budaya Lokal. Penulis sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu dalam lima tahun. Maka dari itu, untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PAREPARE”**.